

Berita Jumat, 10 Juli

Kesimpulan

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi internasional menunjukkan bahwa perekonomian global pada pertengahan 2026 masih berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan menghadapi berbagai tekanan yang saling berkaitan. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia melambat dari 3,5% pada 2025 menjadi 3% pada 2026, sebelum kembali meningkat menjadi 3,4% pada 2027. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, konflik di Timur Tengah, tekanan terhadap negara-negara pengekspor energi, serta meningkatnya inflasi akibat lonjakan harga minyak. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi prospek ekonomi dunia karena pencabutan pengecualian sanksi terhadap minyak Iran dan berakhirnya gencatan senjata mendorong kenaikan harga minyak dan meningkatkan biaya energi global. Kenaikan harga energi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi, transportasi, dan distribusi berbagai barang, sehingga dapat memperbesar tekanan inflasi di banyak negara. Meskipun demikian, IMF menilai perekonomian global masih mampu menghadapi guncangan perang lebih baik daripada yang sebelumnya dikhawatirkan karena perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan energi terbarukan turut membantu mengurangi dampak negatif konflik terhadap aktivitas ekonomi. Namun, risiko eskalasi konflik tetap menjadi ancaman serius sehingga stabilitas harga, independensi bank sentral, dan pengawasan sektor keuangan perlu terus diperkuat.

Tekanan ekonomi global tersebut kemudian tercermin dalam kondisi berbagai negara besar, terutama Jepang yang menghadapi tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar yen. Harga grosir Jepang meningkat 7,1% secara tahunan pada Juni 2026, lebih tinggi dibandingkan proyeksi pasar dan kenaikan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya energi akibat konflik di Timur Tengah serta pelemahan yen yang membuat harga bahan baku dan energi impor menjadi semakin mahal. Indeks harga impor berbasis yen bahkan meningkat 29,7% secara tahunan, menunjukkan besarnya tekanan biaya yang dihadapi pelaku usaha Jepang. Dalam waktu yang sama, pemerintah Jepang juga mendorong dana pensiun raksasa untuk meningkatkan investasi di aset domestik, sebuah kebijakan yang berpotensi membalikkan arus modal yang selama bertahun-tahun mengalir ke luar negeri. Apabila kebijakan tersebut berhasil mendorong dana pensiun untuk meningkatkan investasi dalam negeri, yen dapat memperoleh dukungan dan sektor strategis seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, serta pertahanan dapat memperoleh pembiayaan lebih besar. Namun, perubahan arah investasi tersebut juga berpotensi mengurangi permintaan terhadap aset asing dan menimbulkan dampak terhadap pasar obligasi serta arus modal global. Dengan demikian, kebijakan domestik Jepang memiliki potensi pengaruh yang lebih luas terhadap sistem keuangan internasional.

Di Amerika Serikat, perubahan kebijakan Federal Reserve juga menunjukkan bahwa bank sentral menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. The Fed membentuk lima gugus tugas yang melibatkan berbagai akademisi, mantan pembuat kebijakan, dan tokoh dunia usaha untuk mengevaluasi strategi komunikasi, pengelolaan neraca, penggunaan data, produktivitas, lapangan kerja, serta perkembangan kecerdasan buatan. Langkah ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan kebijakan moneter Amerika Serikat tetap relevan terhadap perubahan struktur ekonomi dan tantangan baru yang muncul dari perkembangan teknologi. Sementara itu, di kawasan Asia, berbagai negara diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Malaysia diproyeksikan tumbuh 4,7%, Filipina 3,9%, Thailand 1,9%, China 4,6%, dan India 6,4%, yang seluruhnya menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlambatan ekonomi global tidak hanya dialami negara-negara maju, tetapi juga negara-negara berkembang yang sebelumnya menjadi motor pertumbuhan dunia. Oleh karena itu, perekonomian internasional semakin dituntut untuk

beradaptasi terhadap perubahan rantai pasok, tekanan energi, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik yang semakin cepat berubah.

Di tengah situasi global tersebut, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan banyak negara lainnya. IMF mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% pada 2026 dan 5,1% pada 2027, sementara sejumlah negara lain mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan. Ketahanan tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% pada kuartal I-2026. Pemerintah menilai perekonomian nasional masih berada dalam kondisi aman dan solid, meskipun tetap menjalankan berbagai program untuk mendorong pertumbuhan agar mencapai target 5,4% pada akhir 2026. Pemerintah juga berupaya memperkuat sektor produksi melalui berbagai stimulus, antara lain pemberian bea masuk 0% untuk impor LPG, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat guna menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing industri. Selain itu, penguatan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat dan KUR untuk sektor perumahan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas usaha, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong permintaan domestik. Dengan demikian, Indonesia berusaha menjaga pertumbuhan melalui kombinasi antara stimulus, penguatan sisi penawaran, pembiayaan sektor produktif, dan peningkatan daya saing industri.

Meskipun prospek pertumbuhan Indonesia masih cukup kuat, perekonomian nasional tetap menghadapi tekanan dari sektor perdagangan dan eksternal. Neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit sebesar US\$1,61 miliar, yang menjadi defisit pertama setelah Indonesia mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut. Defisit tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya harga minyak dunia yang meningkatkan nilai impor, sementara ekspor mengalami penurunan. Nilai ekspor Indonesia pada Mei tercatat US\$23,2 miliar atau turun 5,73% secara tahunan, sedangkan impor meningkat 22,16% menjadi US\$24,81 miliar. Peningkatan impor terutama berasal dari bahan baku dan barang penolong serta barang modal, yang menunjukkan bahwa kebutuhan industri terhadap input produksi masih tinggi. Meskipun demikian, secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari–Mei 2026 masih mencatat surplus US\$4,03 miliar. Oleh sebab itu, pemerintah menilai defisit pada Mei masih bersifat sementara dan dapat membaik apabila harga minyak kembali mengalami normalisasi. Namun, kondisi tersebut tetap menjadi peringatan bahwa Indonesia masih rentan terhadap gejolak harga energi dunia dan perlu terus memperkuat diversifikasi ekspor, meningkatkan nilai tambah produk, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Selain menghadapi tekanan perdagangan, pemerintah juga harus mengelola tantangan fiskal yang semakin besar. Proyeksi APBN 2026 menunjukkan bahwa belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun, sedangkan pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp3.208,1 triliun. Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menyebabkan defisit APBN diperkirakan melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar 2,68% PDB. Pelebaran defisit tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan fiskal. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pengelolaan keuangan negara menjadi semakin penting karena pemerintah harus tetap menyediakan stimulus dan pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penerimaan negara, optimalisasi aset, pengendalian belanja, dan penguatan pengelolaan investasi menjadi hal penting untuk menjaga kredibilitas serta ketahanan fiskal Indonesia dalam jangka panjang.

Di sisi lain, kondisi harga pangan memberikan perkembangan yang cukup positif bagi masyarakat karena berbagai komoditas pangan mengalami penurunan harga. Harga beras, bawang, cabai, daging ayam, telur, dan daging sapi tercatat mengalami penurunan pada 10 Juli 2026. Penurunan harga pangan berpotensi membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan inflasi, terutama ketika masyarakat masih menghadapi berbagai risiko dari kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar. Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur

bendungan dan jaringan irigasi. Pemerintah meresmikan lima bendungan yang didukung jaringan irigasi sepanjang 280 kilometer dan diproyeksikan mengairi sekitar 40.000 hektare lahan pertanian serta meningkatkan produksi padi hingga 720.000 ton per tahun. Pembangunan tersebut menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi produksi pangan dan mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga komoditas global. Kepastian pasokan air bagi petani menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas, memperluas musim tanam, dan mendukung upaya mencapai swasembada pangan, energi, serta air.

Dalam menghadapi perubahan ekonomi global, Indonesia juga berusaha memperluas kerja sama internasional dan menarik investasi dari berbagai kawasan. Pertemuan Presiden Prabowo dengan tiga mantan Perdana Menteri Thailand menunjukkan upaya memperkuat jejaring persahabatan dan membuka peluang kerja sama di bidang investasi, pengelolaan aset, serta pengembangan ekonomi jangka panjang. Di sisi lain, Indonesia juga menawarkan kawasan industri kepada investor Eurasia melalui keikutsertaan sebagai Official Partner Country dalam INNOPROM 2026. Strategi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berusaha memanfaatkan perubahan rantai pasok global dengan memosisikan diri bukan hanya sebagai pasar besar, tetapi juga sebagai basis produksi dan industrialisasi. Kerja sama dengan Armenia dan kawasan Eurasia juga memiliki nilai strategis karena dapat membuka akses terhadap pasar yang lebih luas melalui hubungan dengan kawasan CIS dan Eurasian Economic Union. Perjanjian perdagangan Indonesia–EAEU berpotensi membuka akses pasar bagi hampir 180 juta penduduk serta memperluas kerja sama dalam bidang teknologi, standar industri, rantai pasok, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, pemerintah berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar, diversifikasi mitra dagang, peningkatan investasi, serta pengembangan industri bernilai tambah.

Perkembangan ekonomi nasional tersebut kemudian tercermin dalam dinamika ekonomi Jawa Tengah yang menunjukkan adanya peluang sekaligus tantangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mencari investor asing dengan kebutuhan investasi sekitar Rp2 triliun untuk merevitalisasi kawasan PRPP Semarang. Revitalisasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki fasilitas yang rusak, tetapi juga mengembangkan kawasan secara menyeluruh agar kembali menjadi pusat bisnis, pariwisata, MICE, dan kegiatan ekonomi strategis. Lokasi PRPP yang dekat dengan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani serta memiliki potensi konektivitas dengan Pelabuhan Tanjung Emas memberikan keunggulan strategis dalam pengembangan kawasan. Namun, besarnya kebutuhan investasi membuat pemerintah daerah perlu menggandeng investor dengan kapasitas modal dan visi jangka panjang. Sambil menunggu masuknya investasi besar, pemerintah juga berupaya menghidupkan kembali aktivitas kawasan melalui pengembangan potensi wisata, kegiatan korporasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Jika revitalisasi berhasil dilakukan, PRPP berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan aktivitas bisnis, menarik wisatawan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Semarang sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Jawa Tengah.

Di daerah lain di Jawa Tengah, investasi juga menunjukkan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Kabupaten Rembang mencatat realisasi investasi sebesar Rp234,58 miliar pada triwulan I 2026 dan berhasil menyerap 5.377 tenaga kerja. Meskipun nilai investasi tersebut baru mencapai 16,76% dari target investasi tahunan sebesar Rp1,484 triliun, peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 14,62% dibandingkan triwulan sebelumnya menunjukkan bahwa investasi yang masuk tetap produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagian besar investasi berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri, sedangkan investasi asing masih memiliki porsi yang lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas iklim investasi dan kemudahan perizinan agar investasi domestik maupun asing dapat terus berkembang. Selain investasi, penguatan ekonomi daerah juga dilakukan melalui pemberian bantuan kepada kelompok usaha masyarakat dan UMKM di Kudus, yang diarahkan agar penerima bantuan tidak terus bergantung pada bantuan sosial, tetapi dapat

berkembang menjadi pelaku usaha yang mandiri. Pendampingan, legalitas usaha, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas menjadi faktor penting agar usaha masyarakat dapat naik kelas dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Namun, Jawa Tengah juga menghadapi tantangan fiskal dan pembangunan yang perlu mendapat perhatian. Kabupaten Blora melaporkan kekurangan anggaran belanja pegawai sekitar Rp100 miliar kepada Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan bahwa sebagian pemerintah daerah menghadapi tekanan dalam memenuhi kebutuhan belanja aparatur. Dengan jumlah ASN yang mencapai lebih dari 12 ribu orang dan sebagian besar berasal dari PPPK, beban belanja pegawai menjadi persoalan yang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Di sisi lain, peningkatan kualitas infrastruktur jalan tetap menjadi kebutuhan penting di Jawa Tengah. Tingkat kemantapan jalan provinsi dan nasional memang telah mencapai tingkat yang relatif tinggi, tetapi peningkatan kualitas jalan masih diperlukan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, perikanan, dan berbagai produk ekonomi lainnya. Infrastruktur jalan yang baik akan mengurangi biaya distribusi, mempercepat konektivitas antardaerah, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus dipandang sebagai bagian penting dari strategi penguatan ekonomi daerah, bukan hanya sebagai pembangunan fisik semata.

Dengan demikian, rangkaian berita tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang sangat kuat antara dinamika ekonomi internasional, kebijakan nasional, dan perkembangan ekonomi daerah. Di tingkat global, perang, harga energi, inflasi, perubahan arus modal, dan perlambatan pertumbuhan menjadi tantangan utama yang dapat memengaruhi seluruh negara. Indonesia relatif mampu mempertahankan prospek pertumbuhan sekitar 5% dan menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain, tetapi tetap menghadapi risiko dari defisit perdagangan, kenaikan impor energi, pelebaran defisit APBN, pelemahan nilai tukar, serta ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah berusaha merespons tantangan tersebut melalui stimulus industri, penguatan KUR, pembangunan infrastruktur pangan, perluasan kerja sama internasional, dan promosi investasi. Di Jawa Tengah, strategi tersebut tercermin melalui upaya revitalisasi PRPP, peningkatan investasi Rembang, penguatan UMKM, pembangunan bendungan dan irigasi, serta peningkatan konektivitas jalan. Oleh karena itu, kesimpulan utama dari seluruh perkembangan tersebut adalah bahwa pertumbuhan ekonomi ke depan tidak cukup hanya diukur dari angka pertumbuhan PDB, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas, memperkuat fondasi produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan pembangunan infrastruktur dan investasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam menghadapi ketidakpastian global, Indonesia dan Jawa Tengah memiliki peluang untuk tetap tumbuh, tetapi keberhasilan tersebut sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kualitas pengelolaan fiskal, kemampuan menarik investasi produktif, penguatan sektor riil, dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat.

Ringkasan

- Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat pada 2026 akibat konflik geopolitik, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia turun dari 3,5% pada 2025 menjadi 3% pada 2026, sebelum meningkat menjadi 3,4% pada 2027. Konflik Amerika Serikat dan Iran menjadi salah satu faktor utama karena berpotensi meningkatkan harga minyak dan inflasi global. Meski demikian, perkembangan kecerdasan buatan dan energi terbarukan dinilai dapat membantu perekonomian dunia menghadapi berbagai guncangan.
- Ketegangan Amerika Serikat dan Iran terus memengaruhi pasar energi dunia. Pencabutan pengecualian sanksi terhadap minyak Iran dan berakhirnya gencatan senjata meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan energi. Kondisi tersebut dapat menaikkan biaya produksi

dan distribusi serta memperbesar tekanan inflasi. IMF mendorong negara-negara untuk menjaga stabilitas harga, independensi bank sentral, dan pengawasan sektor keuangan.

- Sejumlah negara Asia dan negara maju menghadapi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Malaysia diproyeksikan tumbuh 4,7%, Filipina 3,9%, Thailand 1,9%, China 4,6%, dan India 6,4% pada 2026. Perlambatan tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi global telah memengaruhi berbagai kawasan. Negara-negara perlu memperkuat sumber pertumbuhan domestik dan menyesuaikan kebijakan dengan perubahan ekonomi global.
- Jepang menghadapi tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi dan pelemahan yen. Indeks Harga Produsen Jepang naik 7,1% secara tahunan pada Juni 2026. Sementara itu, indeks harga impor berbasis yen meningkat 29,7% akibat pelemahan mata uang dan mahalannya energi impor. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya produksi dan memperkuat tekanan inflasi di Jepang.
- Industri semikonduktor terus melakukan diversifikasi rantai pasok global. King Yuan Electronics dari Taiwan berencana menginvestasikan hingga US\$1,4 miliar untuk membangun fasilitas di Amerika Serikat. Investasi tersebut menunjukkan semakin strategisnya industri chip bagi perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi global. Negara-negara juga berusaha memperkuat ketahanan rantai pasok melalui penyebaran fasilitas produksi di berbagai kawasan.
- China dan Korea Utara memperkuat kerja sama strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Kedua negara mendorong percepatan pelaksanaan berbagai kesepakatan kerja sama. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan geopolitik semakin memengaruhi perdagangan, investasi, dan stabilitas ekonomi kawasan Asia.
- Indonesia masih mampu mempertahankan prospek pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan global. IMF mempertahankan proyeksi pertumbuhan Indonesia sebesar 5% pada 2026 dan 5,1% pada 2027. Ekonomi Indonesia juga tumbuh 5,61% pada kuartal I-2026. Pemerintah tetap berupaya mencapai target pertumbuhan 5,4% melalui berbagai kebijakan dan program ekonomi.
- Pemerintah memberikan stimulus untuk memperkuat sektor produksi dan industri. Beberapa bahan baku dan komoditas strategis memperoleh insentif bea masuk 0% untuk menekan biaya produksi. Pemerintah juga memperkuat pembiayaan melalui KUR, termasuk untuk sektor perumahan. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan aktivitas sektor riil dan daya saing industri.
- Neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit pada Mei 2026 akibat meningkatnya impor dan harga minyak. Defisit mencapai US\$1,61 miliar setelah Indonesia mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut. Namun, secara kumulatif Januari–Mei 2026, Indonesia masih mencatat surplus US\$4,03 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu memperkuat diversifikasi ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
- Tekanan terhadap APBN menjadi salah satu tantangan utama perekonomian Indonesia. Pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.208,1 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp3.942,4 triliun. Akibatnya, defisit APBN diperkirakan melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB. Pemerintah perlu memperkuat penerimaan pajak, meningkatkan efisiensi belanja, dan mengelola pembiayaan secara hati-hati.
- Penguatan penerimaan pajak menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai Rp2.631,4 triliun pada 2026. Pemerintah perlu memperluas basis pajak dan meningkatkan kualitas administrasi perpajakan. Langkah tersebut diperlukan agar pembiayaan pembangunan tidak terlalu bergantung pada PNB dan penerimaan berbasis komoditas.

- Indonesia memperluas kerja sama internasional untuk menarik investasi dan membuka pasar baru. Melalui INNOPROM 2026, Indonesia menawarkan kawasan industri kepada investor Eurasia. Kerja sama dengan Armenia dan EAEU juga berpotensi membuka akses terhadap pasar yang lebih luas. Kerja sama tersebut mencakup perdagangan, teknologi, industri, rantai pasok, dan pengembangan sumber daya manusia.
- Jawa Tengah berupaya menarik investasi sekitar Rp2 triliun untuk merevitalisasi kawasan PRPP Semarang. Revitalisasi tersebut diarahkan untuk mengembangkan pusat bisnis, pariwisata, MICE, dan fasilitas pendukung lainnya. Lokasi PRPP yang dekat dengan bandara dan pelabuhan menjadi salah satu keunggulan kawasan. Investor dari beberapa negara telah menunjukkan minat terhadap proyek tersebut.
- Realisasi investasi di Kabupaten Rembang mencapai Rp234,58 miliar pada triwulan I 2026. Investasi tersebut menyerap 5.377 tenaga kerja dan meningkat 14,62% dibandingkan triwulan sebelumnya. Investasi dalam negeri masih mendominasi, sementara sektor industri mineral nonlogam menjadi salah satu penyumbang terbesar. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan investasi melalui perbaikan pelayanan dan perizinan.
- Pemerintah memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal kepada kelompok usaha dan UMKM. Bantuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi masyarakat. Penerima juga didukung dalam pengurusan legalitas, sertifikasi, dan perizinan usaha. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, usaha masyarakat diharapkan dapat berkembang dan naik kelas.
- Kabupaten Blora menghadapi kekurangan anggaran belanja pegawai sekitar Rp100 miliar. Kondisi tersebut berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan aparatur, terutama setelah bertambahnya jumlah PPPK. Pemerintah daerah perlu mengelola anggaran secara hati-hati agar belanja pegawai tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
- Peningkatan kualitas infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Kemantapan jalan provinsi mencapai sekitar 94%, sedangkan jalan nasional mencapai 93,47%. Infrastruktur yang baik dapat memperlancar distribusi barang, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan konektivitas antardaerah. Pemerintah terus mengupayakan pembangunan jalan melalui dukungan anggaran daerah dan program pemerintah pusat.
- Secara keseluruhan, perekonomian global masih menghadapi tekanan, tetapi Indonesia dan Jawa Tengah tetap memiliki peluang untuk tumbuh. Konflik geopolitik, inflasi, harga energi, dan perlambatan ekonomi menjadi tantangan utama di tingkat internasional. Indonesia berupaya menjaga pertumbuhan melalui stimulus, penguatan industri, investasi, dan perluasan kerja sama perdagangan. Jawa Tengah berfokus pada investasi, UMKM, lapangan kerja, infrastruktur, dan penguatan ekonomi daerah. Keberhasilan menghadapi tantangan tersebut akan sangat bergantung pada kualitas kebijakan, pengelolaan fiskal, peningkatan daya saing, dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Implikasi

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi global berimplikasi pada semakin ketatnya persaingan antarnegara dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi. Kondisi tersebut mendorong negara-negara untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing industri, mengembangkan teknologi, dan menciptakan kebijakan yang lebih menarik bagi investor. Persaingan yang semakin kuat juga membuat negara perlu memperluas pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada kondisi ekonomi negara tertentu. Dengan demikian, perlambatan ekonomi global dapat mendorong percepatan reformasi struktural dan inovasi di berbagai negara.

- Konflik antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi memperbesar ketidakstabilan pasar energi global. Ketidakstabilan tersebut dapat mendorong kenaikan harga minyak dan meningkatkan biaya energi yang harus ditanggung oleh dunia usaha. Kenaikan biaya energi kemudian dapat meningkatkan biaya produksi, transportasi, dan distribusi barang di berbagai negara. Pada akhirnya, kondisi tersebut berpotensi memperbesar tekanan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat secara global.
- Meningkatnya ketegangan geopolitik juga dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan internasional. Ketika risiko konflik meningkat, investor cenderung memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman. Perubahan arus modal tersebut dapat menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar dan pasar keuangan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, negara dengan fundamental ekonomi yang lemah berpotensi menghadapi biaya pembiayaan yang lebih tinggi dan tekanan terhadap stabilitas ekonominya.
- Pelemahan yen dan kenaikan harga impor Jepang menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar dapat memperkuat tekanan inflasi dalam suatu negara. Ketika mata uang melemah, biaya pembelian energi dan bahan baku dari luar negeri menjadi lebih mahal. Kenaikan biaya impor tersebut kemudian dapat diteruskan kepada harga barang dan jasa di dalam negeri. Kondisi ini mendorong pemerintah dan bank sentral untuk mengambil kebijakan guna menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi.
- Perubahan arah investasi dana pensiun Jepang berpotensi memengaruhi arus modal internasional. Apabila dana pensiun Jepang meningkatkan investasi pada aset domestik, sektor strategis seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, dan pertahanan dapat memperoleh tambahan pembiayaan. Namun, berkurangnya investasi Jepang di luar negeri dapat mengurangi aliran modal ke pasar negara lain. Perubahan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi harga aset, suku bunga, dan stabilitas pasar keuangan global.
- Perkembangan industri semikonduktor dan kecerdasan buatan menunjukkan bahwa teknologi semakin menjadi faktor utama dalam persaingan ekonomi dunia. Negara yang mampu menyediakan infrastruktur, tenaga kerja terampil, dan lingkungan investasi yang mendukung akan lebih berpeluang menarik perusahaan teknologi global. Masuknya investasi teknologi kemudian dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan transfer teknologi, dan memperkuat posisi negara dalam rantai pasok internasional. Oleh karena itu, pengembangan teknologi menjadi semakin penting untuk menjaga daya saing ekonomi suatu negara.
- Ketahanan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan global memberikan peluang untuk mempertahankan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di sekitar 5% menunjukkan bahwa pasar domestik dan aktivitas ekonomi nasional masih memiliki kekuatan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Namun, peluang tersebut harus didukung oleh perbaikan iklim investasi, kepastian regulasi, dan peningkatan kualitas infrastruktur.
- Meskipun pertumbuhan ekonomi masih cukup kuat, perlambatan ekonomi global dapat menekan permintaan terhadap ekspor Indonesia. Penurunan permintaan tersebut dapat memengaruhi kinerja industri yang bergantung pada pasar luar negeri. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperluas tujuan ekspor dan meningkatkan nilai tambah produk agar tidak terlalu bergantung pada komoditas mentah. Diversifikasi pasar dan produk tersebut dapat membantu menjaga kestabilan ekspor ketika kondisi ekonomi global mengalami tekanan.
- Defisit perdagangan pada Mei 2026 menunjukkan bahwa kenaikan harga energi global dapat langsung memengaruhi kondisi eksternal Indonesia. Ketika harga minyak meningkat, nilai impor energi ikut bertambah sehingga dapat mempersempit surplus perdagangan atau

bahkan menimbulkan defisit. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan kebutuhan terhadap valuta asing dan memberikan tekanan terhadap rupiah. Oleh sebab itu, penguatan energi domestik dan pengurangan ketergantungan terhadap impor energi menjadi semakin penting.

- Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, dan barang modal yang dibutuhkan oleh industri. Kenaikan biaya tersebut dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan dan pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Jika tekanan tersebut terus berlangsung, daya beli masyarakat dapat ikut terpengaruh. Karena itu, stabilitas nilai tukar perlu dijaga melalui penguatan ekspor, pengelolaan arus modal, dan peningkatan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi nasional.
- Pelebaran defisit APBN menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah tetap membutuhkan anggaran besar untuk membiayai pembangunan, perlindungan sosial, dan berbagai program ekonomi. Namun, peningkatan belanja yang tidak diikuti penguatan penerimaan dapat memperbesar kebutuhan pembiayaan negara. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak dan efisiensi belanja menjadi penting agar pemerintah tetap memiliki ruang fiskal untuk menghadapi berbagai risiko ekonomi.
- Penguatan penerimaan pajak menjadi semakin penting karena kesehatan fiskal sangat menentukan kemampuan pemerintah menjalankan pembangunan. Perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan dapat memperbesar penerimaan negara secara berkelanjutan. Penerimaan yang lebih kuat akan mengurangi ketergantungan terhadap PNBPN dan penerimaan berbasis komoditas. Dengan demikian, pemerintah dapat memiliki sumber pembiayaan yang lebih stabil untuk mendukung pembangunan jangka panjang.
- Stimulus berupa pembebasan bea masuk dan penguatan KUR dapat membantu menjaga aktivitas sektor riil. Penurunan biaya impor bahan baku dapat membantu industri mempertahankan produksi dan daya saingnya. Sementara itu, akses pembiayaan yang lebih luas dapat membantu UMKM dan pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonominya. Jika kebijakan tersebut berjalan efektif, dampaknya dapat terlihat dalam peningkatan produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
- Pembangunan bendungan dan jaringan irigasi dapat memperkuat ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Ketersediaan air yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan memperluas musim tanam. Peningkatan produksi dalam negeri kemudian dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pangan juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap gejolak harga pangan internasional.
- Perluasan kerja sama perdagangan dengan kawasan Eurasia dapat membuka peluang baru bagi ekspor dan investasi Indonesia. Akses terhadap pasar baru dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional yang mungkin mengalami perlambatan. Peningkatan kerja sama juga berpotensi mendorong transfer teknologi dan pengembangan industri dalam negeri. Oleh karena itu, diversifikasi mitra dagang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi perubahan ekonomi global.
- Rencana revitalisasi PRPP Semarang berpotensi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. Masuknya investasi dalam jumlah besar dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata, MICE, perhotelan, perdagangan, dan jasa. Perkembangan berbagai sektor tersebut kemudian dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, revitalisasi PRPP berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Kota Semarang dan wilayah sekitarnya.
- Letak PRPP yang dekat dengan bandara dan pelabuhan dapat memperkuat daya tarik kawasan bagi investor. Konektivitas yang baik dapat mempermudah mobilitas orang, barang, dan kegiatan bisnis. Kemudahan tersebut dapat meningkatkan efisiensi kegiatan

usaha dan memperkuat posisi Semarang sebagai pusat ekonomi Jawa Tengah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur pendukung menjadi faktor penting bagi keberhasilan revitalisasi kawasan tersebut.

- Realisasi investasi di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa investasi dapat memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Bertambahnya investasi dapat meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan memperluas sumber pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut kemudian dapat mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi lokal. Oleh sebab itu, peningkatan investasi perlu terus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja.
- Pemberdayaan kelompok usaha dan UMKM dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Bantuan modal dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan kegiatan usahanya. Namun, agar bantuan tersebut memberikan hasil berkelanjutan, penerima juga membutuhkan pendampingan, legalitas, dan peningkatan keterampilan. Dengan dukungan tersebut, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan naik kelas.
- Kekurangan anggaran belanja pegawai di Blora menunjukkan adanya tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah daerah. Besarnya kebutuhan belanja aparatur dapat mengurangi anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan pelayanan publik. Jika kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program produktif dapat menjadi terbatas. Oleh karena itu, efisiensi anggaran dan perencanaan kebutuhan aparatur menjadi penting untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
- Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dapat memperkuat konektivitas dan efisiensi ekonomi Jawa Tengah. Jalan yang lebih baik dapat mempercepat distribusi hasil pertanian, perikanan, dan produk industri. Distribusi yang lebih lancar kemudian dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk daerah. Dengan demikian, pembangunan jalan tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berita Sabtu, 11 Juli

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada 11 Juli 2026 menunjukkan bahwa perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian yang kuat akibat meningkatnya persaingan perdagangan, ketegangan geopolitik, serta gangguan terhadap rantai pasok dan energi. Kondisi tersebut terlihat dari langkah Uni Eropa yang mulai berupaya mengurangi ketergantungannya terhadap China dengan menyiapkan instrumen solidaritas untuk membantu perusahaan melakukan diversifikasi sumber pasokan barang-barang strategis. Upaya ini dilakukan karena besarnya ketergantungan Eropa terhadap China, terutama untuk pasokan mineral dan semikonduktor yang dibutuhkan oleh industri penting seperti otomotif dan pertahanan, membuat Uni Eropa rentan apabila terjadi konflik dagang atau pembatasan ekspor dari Beijing. Namun, proses diversifikasi tersebut tidak mudah karena membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara negara-negara anggota Uni Eropa sendiri masih menghadapi keterbatasan anggaran dan perbedaan pandangan mengenai seberapa tegas kebijakan yang harus diambil terhadap China. Oleh karena itu, Uni Eropa berusaha menyeimbangkan hubungan dagangnya melalui dialog, peningkatan impor dari Eropa ke China, pengurangan hambatan akses pasar, serta penggunaan instrumen perlindungan perdagangan apabila diperlukan. Akan tetapi, ketergantungan terhadap pasokan strategis dari China membuat Uni Eropa harus berhati-hati karena tindakan yang terlalu keras berpotensi memicu pembalasan dari Beijing dan kembali mengganggu rantai pasok industri Eropa.

Kerentanan rantai pasok global tersebut semakin terlihat dalam perkembangan pasar energi setelah Rusia menghentikan ekspor solar pada saat pasokan bahan bakar dunia sudah berada dalam kondisi ketat. Penghentian ekspor tersebut langsung menambah tekanan terhadap pasar karena Rusia merupakan salah satu eksportir solar terbesar dunia, sementara ekspor dari negara tersebut sebelumnya juga telah mengalami penurunan akibat terganggunya aktivitas kilang. Berkurangnya pasokan Rusia kemudian terjadi bersamaan dengan menurunnya persediaan solar di Amerika Serikat dan meningkatnya kembali ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, sehingga negara-negara importir harus bersaing mendapatkan pasokan dari sumber yang semakin terbatas. Persaingan tersebut mendorong kenaikan harga solar di Amerika Serikat dan Eropa, meskipun kedua kawasan tersebut tidak lagi mengimpor bahan bakar Rusia secara langsung. Kenaikan harga solar selanjutnya berpotensi meningkatkan biaya berbagai sektor yang bergantung pada bahan bakar tersebut, mulai dari transportasi berat, pertanian, industri hingga pembangkit listrik. Dengan demikian, gangguan terhadap pasokan energi di satu negara dapat menimbulkan dampak luas karena pasar energi global memiliki keterkaitan yang sangat kuat antarwilayah.

Tekanan terhadap pasar energi tersebut juga memperlihatkan bahwa ketegangan geopolitik dapat mengubah proyeksi ekonomi global dalam waktu singkat. Badan Energi Internasional sebelumnya memperkirakan pasar minyak dunia akan mengalami surplus pada 2027 karena pasokan diproyeksikan meningkat lebih cepat daripada permintaan, tetapi proyeksi tersebut terancam apabila konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat. Meskipun pembukaan kembali Selat Hormuz telah mendorong sebagian pasokan minyak kembali ke pasar, kelancaran perdagangan energi tetap sangat bergantung pada keamanan jalur pelayaran tersebut dan tercapainya perdamaian yang berkelanjutan. Bahkan ketika pasokan minyak mentah mulai pulih, aktivitas pengilangan dan pengiriman produk olahan seperti bensin dan solar masih berjalan lebih lambat sehingga pasokan bahan bakar tetap terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan perhatian pasar bergeser dari kekhawatiran kekurangan bahan bakar pesawat menjadi kekhawatiran terhadap terbatasnya pasokan bensin dan solar. Oleh sebab itu, stabilitas geopolitik menjadi faktor yang sangat menentukan bagi harga energi, inflasi, biaya produksi, dan prospek pertumbuhan ekonomi dunia.

Di tengah ketidakpastian tersebut, kebijakan ekonomi di kawasan Asia menunjukkan bahwa negara-negara berusaha menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bank of Thailand memperkirakan inflasi Thailand pada 2026 akan berada di bawah proyeksi sebelumnya sehingga bank sentral masih memiliki ruang untuk mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif. Namun, karena suku bunga Thailand sudah berada pada level yang rendah, ruang untuk kembali menurunkannya semakin terbatas karena kebijakan tersebut dapat merugikan penabung dan menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi Thailand diperkirakan tetap positif meskipun masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank sentral tidak hanya mempertimbangkan perkembangan inflasi, tetapi juga harus memperhatikan dampak kebijakan suku bunga terhadap pertumbuhan, tabungan masyarakat, dan stabilitas sektor keuangan. Selain itu, rencana pengawasan terhadap setoran tunai bernilai besar menunjukkan bahwa penguatan stabilitas ekonomi juga dilakukan melalui pengawasan terhadap potensi peredaran dana ilegal.

Situasi global tersebut kemudian menjadi latar belakang penting bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan berbagai negara dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar tertentu. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kerja sama perdagangan dengan Maroko karena kedua negara memiliki posisi yang saling melengkapi dalam perdagangan global. Indonesia dapat menjadi pintu masuk bagi Maroko menuju pasar ASEAN, sedangkan Maroko dapat menjadi akses bagi Indonesia menuju kawasan Afrika, Eropa, dan Mediterania. Hubungan perdagangan yang terus meningkat, ditambah dengan pertumbuhan investasi Maroko di Indonesia, menunjukkan bahwa masih terdapat peluang besar untuk memperluas kerja sama bilateral. Penandatanganan kesepakatan pengakuan bersama mengenai jaminan produk halal juga menjadi langkah penting karena

dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan mendukung dimulainya kembali perundingan perdagangan preferensial kedua negara. Dengan semakin luasnya jaringan perdagangan tersebut, Indonesia berupaya membangun hubungan ekonomi yang lebih beragam agar peluang ekspor dan investasi tidak hanya bergantung pada mitra dagang tertentu.

Penguatan hubungan perdagangan tersebut kemudian diikuti oleh upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional dari dalam negeri. Pemerintah menilai bahwa ketidakpastian global mengharuskan Indonesia memperkuat rantai pasok, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi agar perekonomian tidak terlalu rentan terhadap gangguan eksternal. Dalam bidang energi, pemerintah mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt yang diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi. Pengembangan energi tersebut kemudian berjalan beriringan dengan upaya memperkuat sektor teknologi melalui pembangunan infrastruktur fiber optik, pusat data, dan ekosistem kecerdasan buatan. Untuk mendukung industri teknologi yang lebih maju, pemerintah juga mendorong pengembangan industri semikonduktor melalui kerja sama dengan mitra internasional serta pelatihan ribuan teknisi dan engineer. Dengan demikian, strategi Indonesia dalam menghadapi perubahan ekonomi global tidak hanya dilakukan melalui diplomasi perdagangan, tetapi juga melalui pembangunan energi, teknologi, sumber daya manusia, dan industri strategis.

Meskipun berbagai upaya tersebut dilakukan, kondisi perekonomian Indonesia masih menghadapi persoalan penting yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas 5% dalam beberapa tahun terakhir ternyata berjalan bersamaan dengan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja dan menyusutnya kelas menengah. Meningkatnya jumlah pekerja yang terkena PHK menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup dan berkualitas. Kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan deindustrialisasi prematur, yaitu melemahnya peran sektor manufaktur sebelum sektor tersebut berkembang secara optimal dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ketika sektor industri melemah, kemampuan perusahaan untuk meningkatkan produksi dan merekrut tenaga kerja ikut berkurang, sehingga risiko PHK semakin besar. Pada saat yang sama, menyusutnya kelas menengah menyebabkan daya beli masyarakat melemah, dan pelemahan daya beli tersebut kemudian menekan permintaan terhadap produk-produk industri dalam negeri. Dengan demikian, persoalan PHK, melemahnya industri, dan menyusutnya kelas menengah saling berkaitan serta menunjukkan bahwa tingginya angka pertumbuhan ekonomi belum secara otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan tersebut kemudian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi perlu diperkuat agar tidak hanya menghasilkan peningkatan nilai tambah komoditas, tetapi juga mampu membangun industri yang berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Apabila hilirisasi masih terlalu bergantung pada naik turunnya harga komoditas global, manfaatnya terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja dapat menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan hilirisasi yang terhubung dengan industri manufaktur, teknologi, dan rantai produksi yang lebih panjang agar nilai tambah yang dihasilkan dapat dinikmati secara lebih luas. Pada saat yang sama, daya beli masyarakat kelas menengah juga perlu dijaga karena konsumsi domestik memiliki peran penting dalam menopang industri seperti otomotif, tekstil, pakaian jadi, dan sektor padat karya lainnya. Jika daya beli masyarakat terus melemah, permintaan terhadap produk dalam negeri dapat menurun dan pada akhirnya semakin menekan aktivitas produksi serta lapangan kerja. Karena itu, penguatan industri dan perlindungan terhadap masyarakat kelas menengah harus dilakukan secara bersamaan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih luas.

Upaya memperkuat perekonomian Indonesia juga dilakukan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menargetkan 40 ribu koperasi dapat beroperasi pada akhir 2026, tetapi pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada pembangunan gedung dan sarana fisik. Agar koperasi benar-benar dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan, pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengelola usaha, memahami tata kelola koperasi, dan memberikan pelayanan kepada anggota. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan menjadi faktor penting karena koperasi yang memiliki fasilitas tanpa manajemen yang baik akan sulit berkembang. Oleh karena itu, pelatihan calon manajer koperasi menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Dengan pengelolaan yang profesional, koperasi diharapkan mampu memperkuat kegiatan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal.

Upaya tersebut kemudian terlihat secara nyata di Jawa Tengah melalui pengembangan koperasi dan UMKM yang diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan transaksi, tetapi juga untuk membangun jaringan usaha dan memperluas pasar. Gelar Produk Koperasi dan UMKM di Surakarta menjadi contoh bagaimana koperasi dari berbagai daerah dapat memperkenalkan produk sekaligus membangun hubungan kemitraan dengan koperasi dan pelaku usaha lainnya. Kegiatan tersebut menjadi penting karena koperasi tidak dapat berkembang sendiri tanpa adanya akses pasar, kerja sama, dan jaringan distribusi yang kuat. Salah satu contoh nyata terlihat pada Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari yang pada awalnya beroperasi dari sebuah garasi rumah, tetapi kemudian mampu berkembang dan mencatat omzet lebih dari Rp300 juta dalam enam bulan pertama 2026. Pertumbuhan omzet tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah anggota dari 32 orang menjadi sekitar 130 orang, yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi sarana untuk memperkuat usaha masyarakat apabila mampu menjawab kebutuhan nyata anggotanya.

Peran Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari semakin penting karena koperasi tersebut tidak hanya menjual kebutuhan pokok, tetapi juga berfungsi sebagai pembeli produk UMKM dan pusat distribusi barang bagi masyarakat. Sebagai pembeli produk UMKM, koperasi membantu menyediakan pasar bagi pelaku usaha sehingga produk mereka memiliki saluran pemasaran yang lebih jelas. Sementara itu, sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, koperasi bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan barang lebih terjamin dan harga dapat lebih kompetitif. Pola tersebut menunjukkan bahwa koperasi dapat berperan dalam memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat hubungan antara produsen, pelaku UMKM, distributor, dan konsumen. Keberhasilan koperasi yang berawal dari garasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan tidak selalu harus menunggu tersedianya fasilitas yang sempurna, tetapi dapat dimulai dari kemampuan masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi yang ada. Dengan demikian, pengalaman Banjarsari menjadi contoh bahwa koperasi dapat tumbuh apabila memiliki kepemimpinan, partisipasi anggota, orientasi pelayanan, dan kemampuan membangun jaringan usaha.

Keberlanjutan pengembangan koperasi di Jawa Tengah kemudian diarahkan melalui penguatan pendidikan perkoperasian agar pemahaman mengenai koperasi tidak hanya dimiliki oleh pengurus, tetapi juga ditanamkan kepada generasi muda sejak dini. Program insersi pendidikan perkoperasian yang menyasar jutaan peserta didik di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya membangun fondasi koperasi dalam jangka panjang. Pendidikan tersebut diharapkan dapat membentuk generasi yang memahami prinsip koperasi dan mampu mengembangkan koperasi secara lebih profesional di masa depan. Upaya tersebut menjadi semakin penting karena Jawa Tengah telah memiliki ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sebagian besar telah beroperasi dan memiliki anggota dalam jumlah besar. Dengan demikian, penguatan koperasi di Jawa Tengah tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik dan kegiatan usaha, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan. Jika seluruh unsur tersebut dapat berjalan secara

konsisten, koperasi berpotensi menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Secara keseluruhan, rangkaian berita tersebut menunjukkan bahwa perekonomian dunia, Indonesia, dan Jawa Tengah menghadapi tantangan yang saling berkaitan dan membutuhkan respons yang terintegrasi. Ketegangan geopolitik dan gangguan energi di tingkat internasional dapat memengaruhi harga, pasokan, inflasi, dan biaya produksi di berbagai negara, sehingga Indonesia perlu memperkuat ketahanan ekonomi dan memperluas jaringan kerja sama perdagangan. Upaya tersebut telah dilakukan melalui penguatan hubungan dengan negara lain, pengembangan energi terbarukan, pembangunan teknologi, dan penguatan industri strategis, tetapi langkah tersebut masih harus diikuti dengan penyelesaian persoalan domestik berupa PHK, melemahnya daya beli, menyusutnya kelas menengah, dan belum optimalnya industrialisasi. Karena persoalan-persoalan tersebut saling berhubungan, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, menjaga daya beli, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Dalam konteks Jawa Tengah, pengembangan koperasi dan UMKM menjadi salah satu contoh bagaimana penguatan ekonomi dapat dilakukan dari tingkat masyarakat melalui peningkatan akses pasar, distribusi, kemitraan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kesimpulan utama dari seluruh berita tersebut adalah bahwa tantangan ekonomi ke depan bukan hanya bagaimana mempertahankan pertumbuhan, tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut memiliki kualitas yang lebih baik, lebih tahan terhadap guncangan global, mampu menciptakan lapangan kerja, dan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata mulai dari tingkat internasional, nasional, hingga masyarakat di daerah.

Ringkasan

- Uni Eropa berupaya mengurangi ketergantungannya terhadap China dalam rantai pasok barang-barang strategis dengan menyiapkan instrumen solidaritas untuk membantu perusahaan melakukan diversifikasi sumber pasokan, tetapi kebijakan tersebut diperkirakan membutuhkan dana yang sangat besar karena nilai perdagangan dan industri yang terlibat sangat luas. Langkah ini dilakukan di tengah defisit perdagangan Uni Eropa terhadap China yang telah melampaui 360 miliar euro, sehingga hubungan dagang kedua pihak berusaha diseimbangkan melalui dialog, peningkatan akses pasar, diversifikasi pasokan, serta kemungkinan penggunaan instrumen perlindungan perdagangan apabila diperlukan. Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan karena China masih menguasai sebagian besar pasokan mineral dan semikonduktor penting bagi industri Eropa, sehingga tindakan yang terlalu tegas berpotensi memicu pembalasan dari Beijing dan mengganggu sektor otomotif, pertahanan, serta industri strategis lainnya.
- Ketergantungan terhadap rantai pasok global juga terlihat dari posisi China yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi industri Eropa melalui pembatasan ekspor bahan-bahan strategis, sebagaimana pernah terjadi ketika pembatasan ekspor unsur tanah jarang menimbulkan kekhawatiran terhadap kelangkaan pasokan dan terganggunya kegiatan manufaktur. Kondisi tersebut membuat Uni Eropa harus mencari sumber pasokan alternatif, meskipun proses pemindahan rantai pasok membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Bahkan, produsen otomotif Eropa sebelumnya harus meminta penangguhan sementara sanksi terhadap salah satu pemasok semikonduktor asal China karena tanpa pengecualian tersebut persediaan mereka berpotensi habis dalam hitungan minggu. Oleh karena itu, upaya diversifikasi Uni Eropa bukan hanya persoalan perdagangan, tetapi juga berkaitan erat dengan keamanan industri dan ketahanan ekonomi jangka panjang.
- Di sektor moneter, Bank of Thailand memperkirakan inflasi Thailand pada 2026 akan berada di bawah proyeksi sebelumnya sebesar 2,8% sehingga bank sentral masih dapat mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi. Inflasi umum Thailand pada Juni tercatat 2,42% dan masih berada dalam target bank sentral

sebesar 1%–3%, sementara suku bunga kebijakan dipertahankan pada level 1% karena belum terdapat kebutuhan untuk menaikkannya. Meskipun demikian, ruang untuk kembali memangkas suku bunga semakin terbatas karena tingkat suku bunga sudah sangat rendah dan penurunan lebih lanjut berpotensi merugikan penabung serta menimbulkan dampak negatif terhadap sistem keuangan. Di sisi lain, ekonomi Thailand diperkirakan tetap tumbuh 2,3% pada 2026, meskipun pertumbuhannya masih relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain di Asia Tenggara.

- Bank of Thailand juga menyiapkan aturan baru untuk memperkuat pengawasan transaksi keuangan dengan mewajibkan nasabah menunjukkan sumber dana untuk setoran tunai bernilai lebih dari 5 juta baht mulai sekitar Oktober hingga November 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk mencegah peredaran dana ilegal dan memperkuat transparansi sistem keuangan. Dengan demikian, kebijakan ekonomi Thailand tidak hanya diarahkan untuk menjaga inflasi dan pertumbuhan, tetapi juga untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keuangan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan sistem keuangan.
- Pasar energi global mengalami tekanan baru setelah Rusia menghentikan ekspor solar, karena kebijakan tersebut terjadi ketika pasokan bahan bakar dunia sudah berada dalam kondisi ketat akibat tingginya permintaan, berkurangnya kapasitas pengilangan, serta meningkatnya ketegangan geopolitik. Rusia merupakan salah satu eksportir solar terbesar dunia, sehingga penurunan eksportnya memberikan dampak besar terhadap pasar global, terutama karena pasokan sebelumnya juga telah terganggu akibat serangan terhadap fasilitas pengilangan. Pada awal Juli 2026, ekspor solar dan gasoil Rusia turun jauh dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya, sementara persediaan solar Amerika Serikat juga berada di bawah rata-rata lima tahun terakhir. Kondisi tersebut mendorong kenaikan harga solar di Amerika Serikat dan Eropa serta meningkatkan persaingan antarnegara untuk memperoleh pasokan dari sumber alternatif.
- Tekanan terhadap pasar solar semakin meningkat setelah ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali memuncak sehingga muncul kekhawatiran terhadap kelancaran pelayaran melalui Selat Hormuz dan distribusi energi dari Timur Tengah. Kombinasi penghentian ekspor Rusia, menurunnya persediaan solar Amerika Serikat, serta ketegangan di kawasan Teluk Persia menyebabkan harga bahan bakar meningkat tajam dan berpotensi berdampak pada sektor transportasi, pertanian, pembangkit listrik, dan industri. Negara-negara seperti Brasil dan Turki harus bersaing dengan negara-negara Eropa untuk mendapatkan pasokan dari Amerika Serikat, sementara pengalihan pasokan Amerika ke Amerika Latin berpotensi semakin mengurangi ketersediaan bahan bakar untuk Eropa. Situasi tersebut menunjukkan bahwa gangguan pasokan energi dapat menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian global meskipun negara tertentu tidak lagi secara langsung mengimpor energi dari Rusia.
- Badan Energi Internasional memperingatkan bahwa meningkatnya kembali ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran dapat menggagalkan proyeksi surplus minyak dunia pada 2027 karena pemulihan pasokan global sangat bergantung pada keamanan pelayaran di Selat Hormuz dan tercapainya perdamaian yang berkelanjutan. Meskipun pasokan minyak dunia meningkat setelah Selat Hormuz kembali dibuka, jumlahnya masih jauh di bawah tingkat sebelum perang, sedangkan proyeksi kenaikan pasokan pada 2027 hanya dapat terealisasi apabila ladang minyak dan kilang kembali beroperasi secara normal. Pada saat yang sama, aktivitas pengilangan dan pengiriman produk minyak pulih lebih lambat dibandingkan ekspor minyak mentah sehingga pasar semakin menghadapi keterbatasan pasokan bensin dan solar. Dengan demikian, konflik geopolitik tidak hanya memengaruhi harga minyak mentah, tetapi juga dapat mengganggu seluruh rantai pasok energi dan mengubah proyeksi keseimbangan pasar minyak dunia.
- Di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global, Indonesia berupaya memperkuat kerja sama perdagangan dengan Maroko karena kedua negara memiliki posisi ekonomi yang saling melengkapi dalam jaringan perdagangan internasional. Indonesia dapat menjadi pintu masuk bagi Maroko menuju pasar ASEAN, sedangkan Maroko dapat menjadi gerbang bagi Indonesia

menuju Afrika, Eropa, dan kawasan Mediterania. Hubungan perdagangan kedua negara menunjukkan perkembangan positif dengan nilai perdagangan yang meningkat pada 2025, disertai surplus perdagangan bagi Indonesia dan kenaikan investasi langsung Maroko di Indonesia. Kerja sama pengakuan bersama mengenai jaminan produk halal juga dinilai penting karena dapat memperkuat kepercayaan pelaku usaha serta mendukung dimulainya kembali perundingan Preferential Trade Agreement antara kedua negara.

- Pemerintah Indonesia juga memperkuat diplomasi ekonomi untuk menghadapi ketidakpastian global dengan mendorong kerja sama internasional dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pemerintah menekankan pentingnya penguatan rantai pasok, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi agar Indonesia lebih mampu menghadapi gangguan ekonomi eksternal. Dalam bidang energi, pemerintah menyiapkan program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt yang diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berusaha menjaga ketersediaan energi, tetapi juga mulai membangun sumber energi yang dapat mendukung transformasi industri dan teknologi di masa depan.
- Selain memperkuat sektor energi, pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur digital dan industri semikonduktor sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Pengembangan jaringan fiber optik dan pusat data diarahkan untuk mendukung perkembangan kecerdasan buatan, sedangkan kerja sama dengan mitra industri semikonduktor digunakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi sekitar 15.000 teknisi dan engineer. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berupaya membangun kemampuan teknologi dalam negeri agar tidak hanya menjadi pasar bagi produk digital dan teknologi asing, tetapi juga memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan industri masa depan.
- Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di atas 5% dalam beberapa tahun terakhir, kualitas pertumbuhan tersebut masih dipertanyakan karena jumlah PHK meningkat dan kelas menengah terus menyusut. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa ratusan ribu pekerja terkena PHK sepanjang 2023 hingga Mei 2026, dengan jumlah yang meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup dan berkualitas. Persoalan tersebut juga dikaitkan dengan deindustrialisasi prematur, yaitu melemahnya sektor manufaktur sebelum mampu berkembang secara optimal sehingga kapasitas produksi dan kemampuan menyerap tenaga kerja ikut menurun.
- Menyusutnya kelas menengah semakin memperkuat persoalan tersebut karena penurunan jumlah masyarakat berpendapatan menengah berdampak langsung terhadap daya beli dan konsumsi domestik. Ketika daya beli melemah, permintaan terhadap produk dalam negeri ikut menurun, terutama pada sektor otomotif, tekstil, pakaian jadi, dan industri padat karya yang sangat bergantung pada konsumsi masyarakat. Penurunan permintaan tersebut dapat mendorong perusahaan mengurangi produksi, menunda ekspansi, dan melakukan pengurangan tenaga kerja sehingga menciptakan siklus yang semakin menekan perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu menjaga daya beli kelas menengah sekaligus memperkuat industri dalam negeri agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan manfaat yang lebih merata.
- Program hilirisasi juga dinilai masih perlu diperkuat karena belum sepenuhnya mampu menciptakan industri bernilai tambah tinggi dan lapangan kerja dalam jumlah besar. Ketergantungan terhadap fluktuasi harga komoditas global dapat membuat manfaat hilirisasi tidak stabil apabila tidak disertai pengembangan industri manufaktur dan teknologi yang lebih kuat. Karena itu, penguatan hilirisasi perlu dilakukan bersama dengan perlindungan terhadap industri dalam negeri dan kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai produksi, tetapi

juga memperkuat struktur industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Pemerintah menargetkan 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat beroperasi pada akhir 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur koperasi, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia melalui pelatihan manajerial agar koperasi dapat dikelola secara profesional. Pelatihan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan calon manajer dalam tata kelola koperasi, pengelolaan usaha, serta pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan program koperasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga oleh kemampuan koperasi tersebut menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.
- Di Jawa Tengah, penguatan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui pengembangan koperasi dan UMKM yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan pameran, tetapi juga diarahkan untuk memperluas pasar dan membangun jejaring usaha. Gelar Produk Koperasi dan UMKM di Surakarta menghadirkan produk dari berbagai kabupaten dan kota serta menjadi ruang bagi koperasi untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat dan menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lainnya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas pasar produk koperasi sekaligus memperkuat koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. Selain itu, kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan Gerakan Pangan Murah dan layanan cek kesehatan gratis sehingga manfaat kegiatan tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat yang hadir.
- Salah satu contoh perkembangan koperasi yang cukup berhasil di Jawa Tengah adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari di Surakarta yang pada awalnya beroperasi dari sebuah garasi rumah, tetapi kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Koperasi tersebut mampu mencatat omzet lebih dari Rp300 juta pada Januari hingga Juni 2026 dan meningkatkan jumlah anggotanya dari 32 menjadi sekitar 130 orang, yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa koperasi dapat tumbuh secara cepat apabila mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Koperasi tersebut tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok, tetapi juga bekerja sama dengan UMKM dengan menjadi pembeli produk mereka sehingga pelaku usaha memperoleh akses pasar yang lebih jelas.
- Selain berfungsi sebagai pembeli produk UMKM, Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari juga berperan sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok dengan menjalin kerja sama dengan Bulog, ID Food, dan distributor lainnya. Peran tersebut memungkinkan koperasi memperpendek rantai distribusi, menjaga ketersediaan pasokan, dan menyediakan barang dengan harga yang lebih kompetitif bagi masyarakat. Model tersebut menunjukkan bahwa koperasi dapat menjalankan fungsi ganda, yaitu membantu pelaku UMKM mendapatkan pasar sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok secara lebih efisien. Keberhasilan koperasi yang bermula dari garasi tersebut juga memperlihatkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat dapat dimulai dari inisiatif lokal tanpa harus menunggu tersedianya gedung atau fasilitas yang sempurna.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya memperkuat koperasi dalam jangka panjang melalui Program Inseri Pendidikan Perkoperasian yang ditujukan untuk membangun pemahaman mengenai koperasi sejak usia sekolah. Program tersebut menyasar jutaan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan sehingga diharapkan dapat membentuk generasi yang memahami prinsip dan manfaat koperasi sejak dini. Pendidikan koperasi dinilai penting karena keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada modal dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang memahami tata kelola dan tujuan koperasi. Dengan demikian, pengembangan koperasi di Jawa Tengah dilakukan melalui pendekatan yang

menyeluruh, mulai dari pembentukan koperasi, penguatan usaha, perluasan kemitraan, peningkatan kualitas pengelola, hingga pendidikan perkoperasian.

- Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan bahwa koperasi dan UMKM dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tengah berbagai tekanan ekonomi global dan nasional. Dengan ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk, sebagian besar telah beroperasi, serta didukung oleh modal dan jumlah anggota yang terus berkembang, Jawa Tengah memiliki dasar yang cukup kuat untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Namun, agar perkembangan tersebut dapat berkelanjutan, koperasi tetap membutuhkan pengelolaan yang profesional, akses pasar yang luas, kemitraan yang kuat, inovasi, dan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Dengan demikian, penguatan koperasi di Jawa Tengah dapat menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor dan wilayah tertentu, tetapi juga mampu menciptakan manfaat bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Implikasi

- Upaya Uni Eropa mengurangi ketergantungan terhadap China akan mendorong diversifikasi rantai pasok global, meskipun dalam jangka pendek dapat meningkatkan biaya produksi karena perusahaan harus mencari pemasok dan sumber bahan baku alternatif.
- Ketegangan perdagangan Uni Eropa dan China berpotensi meningkatkan risiko perang dagang, sehingga perusahaan global perlu memperkuat strategi mitigasi terhadap kemungkinan pembatasan ekspor, kenaikan tarif, dan gangguan pasokan barang strategis.
- Penghentian ekspor solar Rusia berpotensi meningkatkan harga energi dan inflasi global, karena negara-negara importir harus bersaing memperoleh pasokan alternatif yang jumlahnya semakin terbatas.
- Kenaikan harga solar dapat meningkatkan biaya transportasi, pertanian, industri, dan distribusi barang, sehingga pada akhirnya berpotensi menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan harga kebutuhan pokok.
- Meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan Iran dapat mengganggu stabilitas pasar minyak dunia, terutama apabila kembali menghambat pelayaran melalui Selat Hormuz dan mengurangi pasokan minyak maupun produk olahan.
- Gangguan energi tersebut menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan, karena negara-negara perlu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan yang rentan terhadap konflik geopolitik.
- Kebijakan Bank of Thailand yang mempertahankan suku bunga rendah menunjukkan bahwa terkendalinya inflasi memberikan ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun ruang pelonggaran moneter semakin terbatas karena suku bunga sudah berada pada level rendah.
- Penguatan kerja sama perdagangan dengan Maroko dapat membantu Indonesia memperluas pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap mitra dagang tertentu, terutama melalui akses menuju pasar Afrika, Eropa, dan Mediterania.
- Kesepakatan pengakuan produk halal dapat meningkatkan peluang perdagangan Indonesia, tetapi manfaatnya tetap bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas, daya saing, dan standar produk.
- Ketidakpastian energi global memperkuat urgensi Indonesia untuk mengembangkan energi terbarukan, terutama tenaga surya, guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan menjaga ketahanan energi nasional.

- Pengembangan energi surya, baterai kendaraan listrik, dan sistem penyimpanan energi berpotensi menciptakan industri baru, sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing Indonesia dalam ekonomi rendah karbon.
- Pembangunan infrastruktur digital dan industri semikonduktor dapat membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama melalui pengembangan kecerdasan buatan, pusat data, serta peningkatan keterampilan teknis dan engineer.
- Meningkatnya PHK dan menyusutnya kelas menengah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 5% belum sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan yang merata, sehingga penciptaan lapangan kerja dan perlindungan daya beli perlu menjadi perhatian utama.
- Melemahnya daya beli kelas menengah dapat menekan konsumsi domestik dan industri padat karya, sehingga berpotensi memperbesar tekanan terhadap produksi dan lapangan kerja apabila tidak segera diatasi.
- Hilirisasi perlu diarahkan untuk membangun industri manufaktur yang lebih kuat dan menyerap banyak tenaga kerja, bukan hanya meningkatkan nilai tambah komoditas yang masih rentan terhadap perubahan harga global.
- Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lokal, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pengelolaan, kompetensi manajer, dan keberlanjutan kegiatan usaha.
- Pengembangan koperasi dan UMKM dapat memperkuat ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah, terutama melalui perluasan pasar, peningkatan kemitraan, dan penguatan jaringan distribusi.
- Keberhasilan Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari menunjukkan bahwa koperasi dapat berkembang dari skala kecil apabila mampu memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat, sekaligus membangun hubungan dengan pelaku UMKM.
- Peran koperasi sebagai pembeli produk UMKM dapat membantu mengatasi keterbatasan akses pasar, sehingga pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya.
- Fungsi koperasi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok dapat membantu memperpendek rantai pasok dan menjaga ketersediaan barang, terutama melalui kerja sama dengan Bulog, ID Food, dan distributor lainnya.
- Penguatan pendidikan perkoperasian sejak usia sekolah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga keberlanjutan koperasi di Jawa Tengah tidak hanya bergantung pada modal dan fasilitas.
- Secara keseluruhan, koperasi dan UMKM dapat menjadi penopang ketahanan ekonomi Jawa Tengah, tetapi keberhasilannya tetap membutuhkan pengelolaan profesional, akses pasar yang luas, inovasi, dan kemitraan yang berkelanjutan.
- Secara umum, seluruh berita menunjukkan bahwa ketidakpastian global mendorong perlunya penguatan ekonomi dari tingkat internasional hingga daerah, melalui diversifikasi perdagangan, ketahanan energi, pengembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan koperasi dan UMKM agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Berita Minggu, 12 Juli

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi internasional pada 12 Juli 2026 menunjukkan bahwa perekonomian global masih berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian karena arah kebijakan suku bunga, tekanan inflasi, konflik geopolitik, dan perubahan harga energi terus memengaruhi prospek pertumbuhan. Amerika Serikat menjadi salah satu pusat perhatian utama karena Ketua Federal Reserve Kevin Warsh akan menghadapi kesaksian pertamanya di hadapan Kongres bersamaan dengan rilis data

inflasi konsumen dan produsen. Data tersebut menjadi penting karena akan menentukan apakah tekanan inflasi mulai mereda atau justru masih bertahan akibat kenaikan harga energi yang dipengaruhi konflik di Iran. Apabila inflasi terbukti lebih tinggi dari perkiraan, The Fed berpotensi mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama, sedangkan apabila tekanan harga terus menurun, peluang pelonggaran kebijakan moneter akan semakin terbuka. Oleh karena itu, pasar keuangan global masih menunggu kombinasi antara data ekonomi dan pernyataan pejabat bank sentral untuk menentukan arah investasi dan kebijakan moneter ke depan.

Ketidakpastian tersebut tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga terlihat di berbagai kawasan dunia yang menghadapi persoalan ekonomi masing-masing. Kanada masih harus menyeimbangkan tekanan inflasi yang mulai mereda dengan kenaikan harga energi, sementara Korea Selatan menghadapi tekanan dari inflasi yang masih tinggi, pelemahan nilai tukar won, dan kenaikan harga properti sehingga kebijakan suku bunga menjadi perhatian penting. Di China, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat karena kekuatan ekspor belum sepenuhnya mampu mengimbangi lemahnya permintaan domestik dan penjualan ritel. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian global belum bergerak secara seragam karena sebagian negara masih berusaha mengendalikan inflasi, sementara negara lainnya justru menghadapi tantangan untuk menghidupkan kembali konsumsi dan pertumbuhan. Dengan demikian, perkembangan kebijakan bank sentral dan data ekonomi dari negara-negara utama akan tetap menjadi faktor penting yang menentukan stabilitas pasar global.

Di tengah persoalan inflasi dan perlambatan pertumbuhan tersebut, dunia juga menghadapi tantangan struktural berupa semakin terbatasnya pembiayaan pendidikan dan meningkatnya beban utang negara. UNESCO memperingatkan bahwa bantuan untuk pendidikan telah mencapai proporsi terendah dalam dua dekade, sementara bantuan global untuk pendidikan diperkirakan masih dapat mengalami penurunan dalam beberapa tahun ke depan. Pada saat yang sama, banyak negara harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk membayar utang dibandingkan untuk membiayai pendidikan, sehingga pengeluaran pendidikan mengalami stagnasi bahkan penurunan. Keadaan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan akses dan kualitas pendidikan serta menghambat pembangunan jangka panjang karena rendahnya investasi pada sumber daya manusia akan mengurangi kemampuan suatu negara untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, UNESCO mendorong adanya skema debt-for-education swap agar sebagian kewajiban pembayaran utang dapat dialihkan untuk membiayai pendidikan, sehingga persoalan utang tidak semakin mengorbankan investasi pembangunan manusia.

Situasi global tersebut turut menjadi latar belakang penting bagi kebijakan ekonomi Indonesia yang harus menghadapi ketidakpastian eksternal sekaligus menjaga momentum pertumbuhan domestik. Dalam pengelolaan APBN 2026, pemerintah menaikkan target pembiayaan menjadi Rp734,3 triliun karena sebelumnya melakukan frontloading untuk mengantisipasi kemungkinan gejolak pasar keuangan dan perubahan kondisi eksternal. Namun, pada saat yang sama, pemerintah masih memiliki SiLPA sekitar Rp255,5 triliun, sehingga muncul pertanyaan mengenai efektivitas penarikan utang ketika sebagian dana yang telah diperoleh belum sepenuhnya digunakan. Kondisi ini menjadi perhatian karena pemerintah tetap harus membayar bunga atas utang tersebut meskipun dananya masih mengendap dan belum memberikan manfaat ekonomi secara maksimal. Oleh karena itu, persoalan utama APBN pada Semester II-2026 bukan lagi sekadar bagaimana memperoleh pembiayaan, melainkan bagaimana mempercepat penyerapan anggaran agar dana yang telah dihimpun dapat segera digunakan untuk mendorong aktivitas ekonomi dan pembangunan.

Sejalan dengan itu, strategi pembiayaan pemerintah ke depan perlu dilakukan secara lebih selektif dan konservatif karena kondisi pasar obligasi masih relatif stabil dan pemerintah memiliki cadangan fiskal yang cukup besar. Frontloading tetap dapat digunakan ketika terdapat risiko kenaikan suku bunga atau gejolak pasar, tetapi penarikan utang secara agresif tidak lagi efisien apabila kebutuhan pembiayaan telah relatif aman dan dana yang tersedia belum seluruhnya terserap. Dalam kondisi biaya

utang yang tinggi, penggunaan sebagian SAL secara terukur dapat menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan menerbitkan utang baru dengan beban bunga yang mahal. Selain itu, pembiayaan APBN sebaiknya tetap lebih banyak bertumpu pada instrumen berdenominasi rupiah di pasar domestik karena strategi tersebut dapat mengurangi risiko nilai tukar, sementara global bond dan Panda Bond dapat dimanfaatkan secara oportunistik ketika kondisi pasar internasional memberikan keuntungan. Dengan demikian, pengelolaan utang Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan, efisiensi biaya, stabilitas pasar keuangan, dan keberlanjutan fiskal.

Di sisi lain, pemerintah juga berusaha memperkuat perekonomian dari tingkat paling bawah melalui percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini dirancang sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang tidak hanya menyediakan layanan simpan pinjam, tetapi juga kredit mikro dan super mikro dengan bunga lebih rendah, toko sembako, apotek desa, pusat logistik, gudang penyimpanan, hingga fasilitas pendingin untuk menjaga kualitas hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat desa diharapkan memperoleh akses pembiayaan yang lebih murah dan tidak lagi terlalu bergantung pada rentenir, sementara hasil produksi masyarakat dapat disimpan, disalurkan, dan dipasarkan melalui rantai distribusi yang lebih pendek. Pemerintah bahkan menargetkan pembangunan koperasi di sekitar 81.000 desa karena program tersebut dinilai penting untuk segera mengatasi persoalan ekonomi masyarakat sekaligus memastikan penyaluran barang subsidi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Dengan demikian, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu menghubungkan pembiayaan, produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat desa.

Besarnya peran yang diharapkan dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terlihat dari target pemerintah untuk menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp233 triliun per tahun di desa serta meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan. Target tersebut menunjukkan keinginan pemerintah untuk mengubah pola perputaran ekonomi yang selama ini dinilai terlalu terpusat di kota-kota besar agar kekayaan yang dihasilkan dari desa dapat lebih banyak kembali kepada masyarakat di daerah. Namun, agar target tersebut dapat tercapai, koperasi harus mampu dikelola secara profesional dan tidak berhenti pada pembangunan fisik atau pembentukan kelembagaan semata. Koperasi harus memiliki tata kelola yang baik, akses pasar, kemampuan mengelola logistik, sistem distribusi yang transparan, serta sumber daya manusia yang mampu menjalankan fungsi ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk memastikan koperasi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang produktif dan memberikan manfaat langsung bagi anggotanya.

Namun, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui desa dan berbagai program pemerintah tetap menghadapi tantangan dari sisi fiskal daerah. Tambahan pagu Transfer ke Daerah sebesar Rp13,3 triliun memang memberikan ruang fiskal tambahan, tetapi jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan alokasi tahun sebelumnya sehingga banyak pemerintah daerah tetap menghadapi keterbatasan anggaran. Kondisi ini menjadi semakin berat karena daerah harus menanggung berbagai kebutuhan belanja yang meningkat, termasuk pembiayaan gaji PPPK, sementara ruang untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan belanja modal semakin terbatas. Apabila belanja modal dikurangi, dampaknya tidak hanya berupa tertundanya pembangunan jalan, irigasi, atau sekolah, tetapi juga dapat mengurangi aktivitas ekonomi daerah karena belanja pemerintah memiliki efek berganda terhadap konsumsi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan transfer ke daerah perlu disusun berdasarkan kebutuhan riil dan kapasitas fiskal masing-masing daerah agar pengurangan anggaran tidak justru memperlebar kesenjangan pembangunan.

Persoalan fiskal tersebut juga berkaitan dengan penerimaan negara dan pengelolaan kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Penurunan restitusi pajak menjadi Rp171,2 triliun pada Semester I-2026 memang dapat membantu menjaga arus kas pemerintah dalam jangka pendek, tetapi apabila penurunan tersebut terjadi karena pencairan restitusi ditunda, maka kewajiban tersebut tetap harus

dibayarkan pada periode berikutnya. Karena itu, penundaan restitusi tidak dapat dianggap sebagai solusi permanen karena berpotensi menimbulkan beban yang lebih besar di masa mendatang dan mengganggu kepastian bagi wajib pajak. Dengan demikian, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan mengelola arus kas negara dan kewajiban memberikan kepastian pembayaran restitusi kepada wajib pajak agar kebijakan fiskal tetap kredibel dan tidak mengurangi kepercayaan dunia usaha.

Secara umum, meskipun menghadapi berbagai tekanan fiskal dan ketidakpastian eksternal, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% pada Triwulan I-2026 yang ditopang konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah. Untuk mempertahankan momentum tersebut, pemerintah berupaya memperkuat Kawasan Ekonomi Khusus, meningkatkan investasi, mengembangkan pariwisata, memperbaiki efisiensi logistik, dan memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada kemampuan daerah untuk menjadi bagian aktif dari pembangunan, bukan hanya sebagai tempat pelaksanaan program pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi nasional perlu disertai penguatan konektivitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan kapasitas fiskal daerah, serta pengembangan sektor-sektor unggulan yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.

Di Jawa Tengah, arah pembangunan tersebut terlihat melalui semakin kuatnya upaya mengembangkan koperasi, UMKM, pendidikan, infrastruktur, dan sektor-sektor ekonomi berbasis potensi daerah. Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari di Surakarta menjadi contoh nyata bahwa koperasi dapat tumbuh dari skala kecil dan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Berawal dari sebuah garasi rumah, koperasi tersebut mampu meningkatkan jumlah anggota hingga sekitar 130 orang dan mencatat omzet lebih dari Rp300 juta pada enam bulan pertama 2026. Pertumbuhan tersebut terjadi karena koperasi tidak hanya menjual kebutuhan pokok, tetapi juga berperan sebagai pembeli dan pemasar produk UMKM serta menjadi pusat distribusi sembako bagi masyarakat. Dengan demikian, koperasi mampu memberikan kepastian pasar bagi pelaku UMKM sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok melalui rantai distribusi yang lebih efisien. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi lokal apabila dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dikelola secara aktif, meskipun belum memiliki fasilitas yang sempurna sejak awal.

Penguatan koperasi di Jawa Tengah juga diarahkan untuk membangun fondasi jangka panjang melalui pendidikan perkoperasian. Pemprov Jawa Tengah berupaya memasukkan pemahaman mengenai koperasi ke dalam pendidikan dengan sasaran sekitar 6,38 juta peserta didik, karena keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada pemahaman generasi muda terhadap prinsip dan manfaat koperasi. Upaya tersebut menjadi semakin penting karena Jawa Tengah telah memiliki 8.523 KDKMP, dengan sekitar 6.271 koperasi atau 73% telah beroperasi, serta ribuan gedung koperasi telah selesai dibangun. Dengan modal dan jumlah anggota yang terus berkembang, koperasi di Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dari ekonomi kerakyatan. Namun, potensi tersebut tetap harus diikuti dengan peningkatan kualitas manajemen, profesionalisme pengurus, penguatan akses pasar, dan kemampuan menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi anggota.

Perkembangan ekonomi di Jawa Tengah juga terlihat dari Kabupaten Blora yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49% dan menunjukkan kemajuan pada sektor pertanian, peternakan, infrastruktur, serta pendidikan. Keunggulan Blora sebagai daerah dengan populasi sapi potong terbesar di Jawa Tengah, penghasil jagung terbesar kedua, dan salah satu daerah penghasil padi terbesar menunjukkan bahwa sektor berbasis sumber daya lokal masih memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Kemajuan infrastruktur yang ditunjukkan oleh peningkatan kondisi jalan juga mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat, sementara peningkatan akses pendidikan melalui program kerja sama dengan perguruan tinggi diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah akan lebih kuat apabila

pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas manusia dilakukan secara bersamaan karena pembangunan fisik tanpa sumber daya manusia yang memadai tidak akan menghasilkan manfaat yang optimal dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, keseluruhan berita menunjukkan bahwa perekonomian global, Indonesia, dan Jawa Tengah memiliki tantangan yang saling berkaitan. Ketidakpastian suku bunga, inflasi, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi global dapat memengaruhi kondisi pasar keuangan dan kebijakan pembiayaan Indonesia, sementara tekanan fiskal nasional dan daerah menentukan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Indonesia perlu mengelola utang secara lebih hati-hati, mempercepat penyerapan anggaran, menjaga stabilitas fiskal, memperkuat kapasitas daerah, dan memastikan kebijakan ekonomi benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Pada saat yang sama, pengembangan koperasi, UMKM, pendidikan, infrastruktur, dan sektor ekonomi berbasis potensi daerah menjadi strategi penting untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata. Jawa Tengah memberikan gambaran bahwa penguatan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui koperasi yang tumbuh dari bawah, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan potensi daerah seperti pertanian dan peternakan. Dengan demikian, arah utama perekonomian ke depan bukan hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut dikelola secara efisien, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, memperkuat ekonomi daerah, dan menghasilkan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.

Ringkasan

- Perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi karena arah kebijakan suku bunga, perkembangan inflasi, konflik geopolitik, dan perubahan harga energi terus menjadi perhatian utama pasar. Fokus terbesar tertuju pada Amerika Serikat karena Ketua Federal Reserve Kevin Warsh akan menjalani kesaksian pertamanya di hadapan Kongres bersamaan dengan rilis data inflasi konsumen dan produsen, sehingga kombinasi antara data ekonomi dan pernyataan kebijakan tersebut akan menjadi dasar bagi investor untuk menilai apakah tekanan harga mulai mereda atau justru masih bertahan.
- Inflasi konsumen Amerika Serikat diperkirakan mulai melandai setelah kenaikan harga yang terjadi pada periode sebelumnya, terutama karena penurunan harga bensin berpotensi mendorong penurunan indeks harga konsumen secara bulanan. Namun, tekanan inflasi pada tingkat produsen masih diperkirakan cukup kuat karena dampak kenaikan harga energi akibat konflik di Iran belum sepenuhnya hilang dari rantai pasok, sehingga pasar masih memperhitungkan kemungkinan The Fed mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama apabila tekanan inflasi kembali meningkat.
- Meskipun data inflasi menjadi perhatian utama, peluang kenaikan suku bunga The Fed dalam waktu dekat masih dinilai terbatas karena pasar belum melihat tekanan yang cukup kuat untuk mendorong kebijakan tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan moneter Amerika Serikat akan sangat bergantung pada hasil data inflasi, perkembangan penjualan ritel, produksi industri, pembangunan rumah, sentimen konsumen, serta pernyataan para pejabat The Fed yang akan memberikan gambaran lebih luas mengenai kondisi ekonomi dan prospek inflasi.
- Ketidakpastian kebijakan moneter juga terjadi di negara-negara lain karena masing-masing bank sentral menghadapi tekanan ekonomi yang berbeda. Bank of Canada diperkirakan mempertahankan suku bunga karena harus menyeimbangkan perlambatan perdagangan dengan Amerika Serikat dan kenaikan harga energi, sedangkan Bank of Korea menghadapi tekanan untuk menaikkan suku bunga akibat inflasi yang masih tinggi, pelemahan nilai tukar won, dan kenaikan harga properti.
- China juga menjadi perhatian karena pertumbuhannya diproyeksikan melambat meskipun kinerja ekspor masih kuat. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh

permintaan domestik yang belum sepenuhnya pulih dan penjualan ritel yang diperkirakan kembali melemah, sehingga kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kekuatan sektor eksternal dan masih lemahnya konsumsi dalam negeri.

- Selain persoalan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dunia juga menghadapi masalah serius dalam pembiayaan pendidikan akibat menurunnya bantuan pembangunan dan meningkatnya beban utang. UNESCO memperingatkan bahwa porsi bantuan pendidikan terhadap total bantuan pembangunan global telah mencapai tingkat terendah dalam dua dekade, sementara bantuan pendidikan global berpotensi terus menurun hingga 2027 dan menciptakan kesenjangan pembiayaan pendidikan yang semakin besar bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah bawah.
- Meningkatnya beban utang semakin memperburuk kondisi pendidikan karena banyak negara harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk membayar utang daripada membiayai pendidikan. Akibatnya, pengeluaran riil untuk pendidikan mengalami stagnasi atau penurunan, sehingga berpotensi menghambat akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan dalam jangka panjang, sementara UNESCO mendorong penerapan skema debt-for-education swap agar sebagian pembayaran utang dapat dialihkan menjadi investasi di sektor pendidikan.
- Di Indonesia, pemerintah menghadapi tantangan dalam mengelola APBN 2026 karena peningkatan pembiayaan utang berlangsung bersamaan dengan masih besarnya dana yang belum terserap. Pemerintah menaikkan target pembiayaan APBN menjadi Rp734,3 triliun dari target awal Rp689,1 triliun dan telah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp452 triliun hingga Semester I-2026, tetapi pada saat yang sama masih terdapat SiLPA sekitar Rp255,5 triliun.
- Kondisi tersebut menimbulkan perhatian karena pemerintah harus membayar bunga atas utang yang telah ditarik meskipun sebagian dana masih mengendap dan belum sepenuhnya digunakan untuk kegiatan produktif. Oleh karena itu, persoalan utama pemerintah pada Semester II-2026 bukan lagi sekadar mempercepat penarikan utang, melainkan mempercepat penyerapan anggaran agar dana yang telah tersedia dapat segera masuk ke perekonomian dan memberikan manfaat terhadap pertumbuhan.
- Strategi frontloading pembiayaan tetap dinilai dapat digunakan dalam kondisi ketidakpastian global, tetapi pelaksanaannya perlu lebih selektif karena kondisi pasar obligasi domestik masih relatif stabil dan pemerintah memiliki cadangan fiskal melalui SAL. Dalam kondisi biaya utang yang tinggi, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan SAL secara terukur agar tidak harus menerbitkan utang baru dengan bunga yang mahal, sementara penerbitan global bond sebaiknya dilakukan secara oportunistik ketika kondisi pasar internasional mendukung.
- Pembiayaan APBN juga tetap diarahkan untuk lebih banyak menggunakan instrumen berdenominasi rupiah di pasar domestik karena strategi tersebut dapat membantu mengurangi risiko nilai tukar. Sementara itu, pembiayaan melalui utang valuta asing tetap dapat digunakan sebagai bagian dari diversifikasi sumber pendanaan, tetapi porsinya perlu dijaga agar tidak meningkatkan tekanan terhadap stabilitas rupiah dan keuangan negara.
- Pemerintah juga mendorong pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat desa yang terintegrasi. Koperasi tersebut dirancang untuk menyediakan kredit mikro dan super mikro dengan bunga yang lebih rendah, toko sembako, apotek desa, pusat logistik, gudang penyimpanan, gudang pendingin, serta menjadi saluran distribusi barang subsidi agar masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dan kebutuhan pokok dengan akses yang lebih mudah.
- Percepatan pembangunan koperasi hingga sekitar 81.000 desa didorong karena pemerintah menilai persoalan ekonomi masyarakat desa membutuhkan penanganan yang cepat. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani dan nelayan terhadap rentenir, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi praktik spekulasi dan penyelundupan, serta memastikan barang subsidi diterima oleh masyarakat yang memang berhak.

- Pemerintah memperkirakan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menciptakan perputaran ekonomi sekitar Rp233 triliun setiap tahun di desa dan meningkatkan pendapatan produsen sektor pertanian, peternakan, serta perikanan. Melalui koperasi sebagai agregator dan pusat distribusi, pemerintah berharap kekayaan yang dihasilkan dari daerah dapat lebih banyak berputar di wilayah tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terlalu terpusat di kota-kota besar.
- Di sisi fiskal daerah, tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp13,3 triliun menjadi Rp706,3 triliun dinilai belum sepenuhnya mengatasi tekanan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena total TKD 2026 masih lebih rendah dibandingkan tahun 2025, sementara daerah harus menghadapi peningkatan kebutuhan belanja, termasuk pembayaran gaji PPPK, sehingga ruang anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan belanja modal menjadi semakin terbatas.
- Penyempitan ruang fiskal daerah berpotensi menekan pembangunan dan perekonomian lokal karena belanja modal merupakan salah satu penggerak penting aktivitas ekonomi. Apabila belanja untuk jalan, irigasi, sekolah, dan infrastruktur lainnya dikurangi, maka dampaknya tidak hanya berupa tertundanya pembangunan, tetapi juga dapat mengurangi konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan reformasi transfer ke daerah yang lebih mempertimbangkan kebutuhan riil, kapasitas fiskal, kinerja pemerintah, dan karakteristik masing-masing wilayah.
- Pemerintah juga menghadapi perkembangan dalam penerimaan perpajakan dengan realisasi restitusi pajak yang turun 31,5% menjadi Rp171,2 triliun pada Semester I-2026. Penurunan tersebut terutama berasal dari berkurangnya restitusi PPh Badan dan PPN Dalam Negeri, tetapi terdapat kekhawatiran bahwa penurunan tersebut sebagian disebabkan oleh tertahannya pencairan restitusi sehingga hanya memperbaiki arus kas pemerintah dalam jangka pendek dan dapat menimbulkan kewajiban pembayaran yang lebih besar pada periode berikutnya.
- Di tengah berbagai tantangan fiskal tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% pada Triwulan I-2026. Pertumbuhan tersebut didukung oleh konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah, sementara pemerintah berupaya mempertahankan momentum melalui penguatan Kawasan Ekonomi Khusus, peningkatan investasi, pengembangan pariwisata, perbaikan logistik, dan peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
- Di Jawa Tengah, penguatan ekonomi kerakyatan terlihat dari perkembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari di Surakarta yang mampu berkembang dari skala sederhana menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Koperasi yang awalnya beroperasi dari sebuah garasi rumah tersebut berhasil mencatat omzet lebih dari Rp300 juta pada enam bulan pertama 2026 dan meningkatkan jumlah anggota dari 32 orang menjadi sekitar 130 orang.
- Perkembangan tersebut didukung oleh peran koperasi yang tidak hanya menjual kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi off taker bagi produk UMKM dan hub distribusi sembako. Dengan berperan sebagai pembeli dan pemasar produk UMKM, koperasi membantu memberikan kepastian pasar bagi pelaku usaha, sedangkan melalui kerja sama dengan Bulog, ID Food, dan distributor lainnya, koperasi dapat membantu menjamin pasokan dan memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
- Pengalaman Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari menunjukkan bahwa pengembangan koperasi tidak harus menunggu tersedianya fasilitas yang sempurna sejak awal. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, koperasi tersebut mampu berkembang sekaligus memperkuat pelaku UMKM dan toko kelontong di lingkungan sekitarnya.
- Jawa Tengah juga berupaya memperkuat keberlanjutan koperasi melalui pendidikan perkoperasian yang menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut dilakukan karena penguatan koperasi tidak hanya membutuhkan modal dan

infrastruktur, tetapi juga membutuhkan pemahaman masyarakat sejak dini mengenai prinsip, manfaat, dan tata kelola koperasi.

- Hingga saat ini, telah terbentuk 8.523 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah, dengan sekitar 6.271 koperasi atau 73% di antaranya telah beroperasi dan 3.950 gedung koperasi telah selesai dibangun. Dengan modal sekitar Rp34,21 miliar dan jumlah anggota lebih dari 200 ribu orang, perkembangan tersebut menunjukkan besarnya potensi koperasi sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah.
- Selain koperasi, pertumbuhan ekonomi daerah juga terlihat di Kabupaten Blora yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,49% dan memiliki sejumlah keunggulan pada sektor pertanian dan peternakan. Blora tercatat sebagai daerah dengan populasi sapi potong terbesar di Jawa Tengah, menjadi penghasil jagung terbesar kedua, serta masuk dalam enam besar daerah penghasil padi di provinsi tersebut.
- Kemajuan ekonomi Blora juga didukung oleh pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi jalan mantap telah mencapai sekitar 70%, sementara pemerintah daerah mendorong masyarakat desa untuk meningkatkan pendidikan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau, karena peningkatan kualitas SDM dinilai penting untuk memperkuat pelayanan publik dan memastikan pembangunan fisik dapat memberikan manfaat yang lebih besar.
- Secara keseluruhan, berita ekonomi pada 12 Juli 2026 memperlihatkan bahwa tantangan ekonomi global, kebijakan fiskal nasional, dan pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang erat. Ketidakpastian inflasi, suku bunga, konflik geopolitik, dan kondisi ekonomi dunia memengaruhi kebijakan pembiayaan Indonesia, sementara pengelolaan APBN, transfer ke daerah, penguatan koperasi, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan potensi daerah menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
- Dalam konteks tersebut, arah pembangunan ekonomi Indonesia semakin menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan keuangan negara dan penguatan ekonomi dari tingkat masyarakat serta daerah. Jawa Tengah menjadi salah satu contoh bahwa penguatan koperasi, UMKM, pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan sumber daya manusia dapat berjalan secara bersamaan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan.

Implikasi

- Ketidakpastian arah kebijakan suku bunga dan inflasi di Amerika Serikat berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global karena investor akan terus menyesuaikan ekspektasi terhadap keputusan The Fed berdasarkan perkembangan data inflasi, harga energi, dan kondisi ekonomi. Apabila inflasi kembali meningkat akibat kenaikan harga energi, bank sentral dapat mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama sehingga biaya pembiayaan global tetap tinggi, nilai tukar negara berkembang berpotensi mengalami tekanan, dan arus modal internasional dapat bergerak lebih selektif menuju aset yang dianggap lebih aman.
- Perbedaan kondisi ekonomi antarnegara menunjukkan bahwa bank sentral dunia akan menghadapi kebijakan yang semakin beragam dan tidak mudah diseragamkan. Ketika Kanada harus menyeimbangkan perlambatan perdagangan dengan kenaikan harga energi, Korea Selatan menghadapi tekanan inflasi, pelemahan mata uang, dan kenaikan harga properti, sedangkan China menghadapi lemahnya permintaan domestik, maka kebijakan suku bunga setiap negara akan lebih bergantung pada kondisi domestik masing-masing dan berpotensi menciptakan perbedaan arah kebijakan moneter global yang lebih besar.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi China berpotensi memberikan dampak terhadap negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan dan rantai pasok yang kuat dengan China. Apabila konsumsi domestik dan penjualan ritel China tetap lemah, permintaan terhadap barang dan komoditas dari negara lain dapat ikut terpengaruh, sehingga negara-negara mitra dagang

perlu memperkuat diversifikasi pasar dan tidak terlalu bergantung pada satu sumber permintaan eksternal.

- Kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik dapat memperbesar tekanan inflasi global karena biaya produksi, transportasi, dan distribusi akan meningkat secara bersamaan. Dampak tersebut dapat menjalar dari sektor energi ke harga barang dan jasa secara lebih luas, sehingga negara-negara harus menghadapi dilema antara menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan subsidi dan bantuan sosial atau mempertahankan stabilitas fiskal dengan membatasi tambahan pengeluaran pemerintah.
- Penurunan bantuan pembangunan untuk sektor pendidikan berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas sumber daya manusia antarnegara dalam jangka panjang. Ketika negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah semakin kesulitan membiayai pendidikan akibat berkurangnya bantuan dan meningkatnya pembayaran utang, kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan tenaga kerja berkualitas, dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga dapat semakin terbatas.
- Meningkatnya jumlah negara yang mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembayaran utang dibandingkan pendidikan menunjukkan adanya risiko bahwa beban utang dapat mengorbankan investasi pembangunan manusia. Apabila kondisi tersebut berlanjut, negara akan menghadapi konsekuensi jangka panjang berupa rendahnya kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, sehingga diperlukan kebijakan pembiayaan alternatif seperti debt-for-education swap agar pengelolaan utang tetap berjalan tanpa mengurangi investasi pada sektor pendidikan.
- Ketidakpastian kebijakan moneter global dapat meningkatkan risiko terhadap stabilitas keuangan Indonesia karena perubahan suku bunga Amerika Serikat dan negara maju dapat memengaruhi arus modal, nilai tukar rupiah, serta biaya pembiayaan pemerintah. Apabila investor global menarik dana dari pasar negara berkembang untuk kembali ke aset yang lebih aman, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan terhadap rupiah dan kenaikan imbal hasil obligasi, sehingga pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan secara lebih hati-hati.
- Kondisi APBN 2026 menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih memperhatikan kualitas penggunaan pembiayaan, bukan hanya jumlah dana yang berhasil dihimpun. Ketika target pembiayaan utang meningkat sementara masih terdapat SiLPA yang cukup besar, pemerintah berpotensi menanggung beban bunga atas dana yang belum sepenuhnya digunakan, sehingga percepatan penyerapan anggaran dan pengalihan dana ke kegiatan yang produktif menjadi semakin penting.
- Peningkatan pembiayaan utang pada saat biaya bunga masih tinggi dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Semakin besar pembayaran bunga dan pokok utang yang harus disediakan dalam APBN, semakin kecil ruang pemerintah untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan program pembangunan lainnya, sehingga strategi pembiayaan harus mempertimbangkan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
- Penggunaan SAL secara terukur dapat membantu pemerintah mengurangi kebutuhan menerbitkan utang baru dengan biaya yang mahal, tetapi penggunaannya tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi bantalan fiskal negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menentukan keseimbangan antara memanfaatkan dana yang sudah tersedia dan tetap mempertahankan cadangan yang cukup untuk menghadapi guncangan ekonomi atau kebutuhan pembiayaan yang tidak terduga.
- Ketergantungan yang lebih besar pada pembiayaan rupiah di pasar domestik dapat membantu mengurangi risiko nilai tukar, tetapi pada saat yang sama berpotensi meningkatkan persaingan antara pemerintah dan sektor swasta dalam memperoleh dana. Jika penerbitan obligasi pemerintah terlalu besar, biaya pembiayaan sektor swasta dapat meningkat dan investasi swasta

berpotensi tertekan, sehingga strategi penerbitan utang perlu disesuaikan dengan kondisi likuiditas pasar domestik.

- Percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi memperkuat inklusi keuangan dan aktivitas ekonomi masyarakat desa karena masyarakat memperoleh akses terhadap pembiayaan, kebutuhan pokok, layanan distribusi, dan pasar yang lebih terorganisasi. Apabila koperasi dapat dikelola secara profesional, keberadaannya dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan posisi tawar produsen, serta membantu meningkatkan pendapatan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.
- Namun, percepatan pembangunan koperasi dalam jumlah besar juga meningkatkan kebutuhan terhadap tata kelola, pengawasan, dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Apabila koperasi hanya dibentuk secara administratif tanpa kemampuan mengelola keuangan, distribusi, dan usaha secara profesional, maka program tersebut berisiko tidak berkelanjutan dan bahkan dapat menimbulkan masalah baru dalam pengelolaan dana maupun aset koperasi.
- Target perputaran ekonomi desa hingga ratusan triliun rupiah menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Apabila aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dapat lebih banyak berputar di desa, maka manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dapat lebih banyak diterima oleh masyarakat lokal, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih merata.
- Penyempitan ruang fiskal pemerintah daerah berpotensi menghambat pembangunan daerah apabila pengurangan transfer tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pendapatan asli daerah. Ketika belanja pegawai dan kewajiban lainnya meningkat, pemerintah daerah cenderung mengurangi belanja modal karena belanja tersebut lebih mudah ditunda, sehingga pembangunan jalan, irigasi, sekolah, dan infrastruktur publik dapat melambat serta mengurangi efek pengganda terhadap perekonomian lokal.
- Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Transfer ke Daerah perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas dan kebutuhan setiap wilayah karena pemangkasan yang seragam dapat menimbulkan dampak yang tidak sama. Daerah dengan PAD rendah, kebutuhan pembangunan tinggi, atau sedang menghadapi pemulihan bencana akan lebih rentan mengalami tekanan fiskal, sehingga formula transfer perlu mempertimbangkan biaya pelayanan publik, kondisi geografis, kapasitas fiskal, dan kebutuhan pembangunan secara lebih rinci.
- Penurunan restitusi pajak dapat memberikan manfaat terhadap arus kas pemerintah dalam jangka pendek, tetapi apabila terjadi karena penundaan pembayaran kepada wajib pajak, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah fiskal dan kepercayaan di masa depan. Kewajiban restitusi yang tertunda tetap harus dibayarkan sehingga hanya akan menggeser beban pembayaran ke periode berikutnya, sementara ketidakpastian pencairan dapat mengganggu arus kas perusahaan dan menurunkan kepastian dalam perencanaan bisnis.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% menunjukkan bahwa konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah masih menjadi penopang penting perekonomian nasional. Namun, agar pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan di tengah ketidakpastian global, pemerintah perlu memastikan bahwa investasi benar-benar diarahkan pada sektor produktif, pembangunan infrastruktur meningkatkan efisiensi ekonomi, dan kebijakan fiskal mampu menjaga daya beli masyarakat tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap utang negara.
- Perkembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Banjarsari menunjukkan bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi lokal apabila dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dikelola secara aktif. Keberhasilan koperasi tersebut dalam meningkatkan jumlah anggota dan mencatat omzet ratusan juta rupiah menunjukkan bahwa koperasi dapat berfungsi sebagai penghubung antara pelaku UMKM, distributor, dan konsumen sehingga kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih terorganisasi.

- Peran koperasi sebagai off taker bagi produk UMKM berpotensi memberikan kepastian pasar yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama pelaku usaha kecil. Ketika koperasi menyerap dan membantu memasarkan produk UMKM, pelaku usaha tidak hanya memperoleh akses penjualan yang lebih luas, tetapi juga dapat meningkatkan kapasitas produksi karena memiliki saluran pemasaran yang lebih jelas dan berkelanjutan.
- Fungsi koperasi sebagai hub distribusi sembako juga berpotensi menekan biaya distribusi dan menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok di tingkat masyarakat. Dengan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rantai pasok, koperasi dapat memperpendek jalur distribusi sehingga harga menjadi lebih kompetitif dan masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan pokok.
- Program pendidikan perkoperasian yang menasar jutaan peserta didik berpotensi membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang lebih kuat dalam jangka panjang. Dengan mengenalkan prinsip koperasi sejak usia sekolah, generasi muda diharapkan tidak hanya memahami koperasi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai bentuk usaha bersama yang membutuhkan profesionalisme, partisipasi anggota, tanggung jawab, dan tata kelola yang baik.
- Besarnya jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk di Jawa Tengah menunjukkan adanya potensi ekonomi yang besar, tetapi juga meningkatkan kebutuhan terhadap pembinaan dan pengawasan. Semakin banyak koperasi yang beroperasi, semakin penting pula peningkatan kapasitas pengurus, transparansi pengelolaan keuangan, penguatan akses pasar, dan evaluasi kinerja agar koperasi tidak hanya aktif secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekonomi kepada anggota dan masyarakat.
- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora sebesar 5,49% menunjukkan bahwa sektor berbasis potensi lokal masih memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan daerah. Keunggulan Blora dalam peternakan sapi potong dan produksi tanaman pangan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan industri pengolahan dan hilirisasi sehingga nilai tambah yang dihasilkan tidak hanya berasal dari penjualan komoditas mentah, tetapi juga dari proses produksi dan pengolahan di daerah.
- Peningkatan kondisi jalan dan pembangunan infrastruktur di Blora berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah serta memperlancar distribusi hasil pertanian, peternakan, dan perdagangan. Apabila infrastruktur tersebut terus ditingkatkan, biaya transportasi dapat ditekan dan akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, layanan kesehatan, serta pusat-pusat ekonomi dapat menjadi lebih mudah.
- Program peningkatan pendidikan masyarakat desa melalui kerja sama dengan perguruan tinggi menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah. Peningkatan pendidikan aparatur desa, kader masyarakat, dan pelaku pembangunan di tingkat lokal berpotensi memperbaiki kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pembangunan karena masyarakat yang memiliki kapasitas lebih baik akan mampu mengelola potensi daerah secara lebih efektif.
- Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan bahwa penguatan ekonomi daerah perlu dilakukan melalui kombinasi antara koperasi, UMKM, infrastruktur, sektor pertanian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apabila seluruh sektor tersebut dikembangkan secara terintegrasi, Jawa Tengah berpotensi membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif karena manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar dan pusat perkotaan, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat desa dan pelaku usaha kecil.

Berita Senin, 13 Juli

Kesimpulan

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi internasional menunjukkan bahwa perekonomian global masih menghadapi tekanan besar yang saling berkaitan, terutama akibat meningkatnya ketegangan geopolitik, gangguan terhadap pasokan energi, perubahan arah kebijakan moneter, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara besar. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi ekonomi global karena gangguan terhadap Selat Hormuz berpotensi menghambat jalur perdagangan minyak dunia. Gangguan tersebut kemudian dapat mengurangi pasokan energi global dan mendorong kenaikan harga minyak, sehingga meningkatkan biaya transportasi dan produksi di berbagai negara. Kenaikan biaya tersebut pada akhirnya dapat memperbesar tekanan inflasi dan mempersulit bank sentral dalam menentukan kebijakan suku bunga. Dengan demikian, konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada keamanan kawasan, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi, perdagangan, pasar keuangan, dan kebijakan moneter dunia.

Tekanan akibat kenaikan harga energi tersebut kemudian menjadi tantangan bagi bank sentral di berbagai negara karena mereka harus menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan perlindungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Amerika Serikat, perkembangan inflasi konsumen dan produsen menjadi perhatian penting karena kenaikan harga energi dapat kembali memperkuat tekanan harga, meskipun penurunan harga bensin berpotensi memberikan sedikit kelegaan bagi konsumen. Kondisi tersebut membuat arah kebijakan The Fed menjadi semakin sulit diprediksi karena suku bunga yang terlalu tinggi dapat menekan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pelonggaran kebijakan yang terlalu cepat dapat kembali meningkatkan inflasi. Situasi serupa juga terjadi di negara-negara lain yang harus menghadapi tekanan dari pelemahan mata uang, kenaikan harga energi, dan perubahan arus modal global. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi global pada periode ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter berbagai negara semakin dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dan energi, bukan hanya oleh data inflasi dan pertumbuhan ekonomi domestik.

Perlambatan ekonomi China juga menjadi bagian penting dari perkembangan ekonomi global karena China merupakan salah satu pusat utama perdagangan dan pertumbuhan dunia. Pertumbuhan ekonomi China diperkirakan melambat karena konsumsi domestik dan investasi swasta masih menghadapi tekanan, terutama akibat masalah sektor properti dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Kondisi tersebut membuat pemerintah China berupaya mengurangi ketergantungan terhadap ekspor dengan mendorong konsumsi rumah tangga melalui peningkatan pendapatan, perluasan layanan publik, serta pengembangan sektor konsumsi digital dan berbasis teknologi. Namun, apabila konsumsi domestik belum mampu mengimbangi pelemahan sektor lainnya, China masih akan bergantung pada ekspor sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan. Ketergantungan tersebut menjadi semakin berisiko karena ketegangan perdagangan global dan kebijakan tarif dapat menghambat ekspor China. Oleh sebab itu, pemerintah China diperkirakan perlu menggunakan kebijakan fiskal dan stimulus ekonomi untuk menjaga pertumbuhan, meskipun ruang pelonggaran moneter tetap harus dilakukan secara hati-hati.

Perkembangan di negara-negara Asia lainnya juga memperlihatkan bahwa setiap negara berupaya memperkuat perekonomiannya dengan menghadapi tantangan global melalui strategi yang berbeda. Korea Selatan, misalnya, meningkatkan fokus pada industri chip, pusat data, dan kecerdasan buatan untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru yang berbasis teknologi. Sementara itu, India menghadapi tekanan terhadap nilai tukarnya karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dapat meningkatkan harga energi dan memperbesar beban impor. Jepang juga berupaya memperkuat pasar keuangan domestik melalui peningkatan investasi dana pensiun, sehingga perekonomian tidak terlalu bergantung pada kondisi pasar global. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara

Asia semakin berusaha memperkuat sumber pertumbuhan domestik karena ketidakpastian perdagangan, energi, arus modal, dan geopolitik global masih tinggi. Dengan demikian, perkembangan ekonomi Asia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal masing-masing negara, tetapi juga oleh kemampuan setiap negara dalam mengurangi dampak dari gejolak ekonomi global.

Dalam konteks Indonesia, tekanan global tersebut turut memengaruhi nilai tukar, kondisi fiskal, biaya energi, dan prospek pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki fundamental ekonomi yang relatif kuat sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada di sekitar 5% dan peringkat kredit Indonesia tetap berada pada level investment grade dengan outlook stabil. Stabilitas tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki daya tahan dalam menghadapi ketidakpastian eksternal. Namun, ketahanan tersebut tetap menghadapi tantangan karena rupiah mengalami tekanan akibat tingginya imbal hasil aset Amerika Serikat, meningkatnya risiko global, kenaikan harga minyak, serta kekhawatiran terhadap kondisi neraca pembayaran. Pelemahan rupiah kemudian dapat meningkatkan biaya impor, terutama impor energi, dan pada saat yang sama meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri dalam denominasi dolar AS. Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif terjaga, tekanan terhadap rupiah tetap menjadi salah satu risiko utama yang harus diperhatikan pemerintah dan otoritas moneter.

Pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi tersebut juga memiliki hubungan langsung dengan kondisi APBN karena perubahan nilai tukar dan harga komoditas dapat memengaruhi penerimaan maupun belanja negara. Kenaikan harga minyak, misalnya, dapat meningkatkan biaya impor energi dan kebutuhan subsidi, sedangkan pelemahan rupiah dapat meningkatkan nilai kewajiban pembayaran utang luar negeri. Kondisi tersebut kemudian berpotensi memperbesar kebutuhan pembiayaan negara dan mendorong pelebaran defisit APBN. Meskipun demikian, peningkatan penerimaan pajak menunjukkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah masih memiliki peluang untuk diperkuat. Pertumbuhan penerimaan pajak dan peningkatan tax buoyancy menunjukkan bahwa perbaikan administrasi, digitalisasi, pengawasan, dan perluasan basis pajak mulai memberikan hasil positif. Dengan meningkatnya penerimaan negara, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan, meskipun pengelolaan belanja dan pembiayaan tetap harus dilakukan secara hati-hati agar pelebaran defisit tidak meningkatkan risiko fiskal secara berlebihan.

Di sisi lain, kondisi perekonomian masyarakat menunjukkan perkembangan yang perlu mendapat perhatian karena kepercayaan konsumen mengalami penurunan. Penurunan kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam melihat kondisi pendapatan, lapangan kerja, dan prospek ekonomi ke depan. Sikap yang lebih hati-hati tersebut dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam melakukan pembelian barang tahan lama dan konsumsi lainnya. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang panjang, pelemahan konsumsi rumah tangga dapat memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi karena konsumsi merupakan salah satu komponen utama perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga agar tekanan inflasi, kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi tidak semakin menekan daya beli masyarakat. Kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga sekaligus menciptakan lapangan kerja menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi tetap dirasakan oleh masyarakat.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, pemerintah Indonesia juga terus mendorong investasi dan hilirisasi sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional. Pengembangan berbagai proyek hilirisasi di sektor pertambangan, energi, pangan, biofuel, perkebunan, dan peternakan diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah sekaligus menciptakan lapangan kerja. Investasi tersebut diharapkan dapat memperkuat industri dalam negeri karena bahan baku yang sebelumnya diekspor dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Peningkatan aktivitas industri kemudian dapat mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas basis penerimaan negara. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya menjadi kebijakan untuk meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga menjadi

bagian dari strategi pemerintah untuk membangun struktur ekonomi yang lebih kuat dan tidak terlalu rentan terhadap perubahan harga komoditas global.

Dampak dari berbagai perkembangan ekonomi tersebut juga terlihat pada kondisi Jawa Tengah yang perlu memperkuat sumber pertumbuhan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ketika kemampuan APBD menghadapi tekanan dan ruang belanja pemerintah semakin terbatas, investasi menjadi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Realisasi investasi yang cukup besar di Jawa Tengah menunjukkan bahwa daerah ini masih memiliki daya tarik bagi investor dan memiliki potensi untuk terus mengembangkan sektor-sektor produktif. Investasi tersebut menjadi penting karena tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan Jawa Tengah dalam menarik investasi perlu terus didukung melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas infrastruktur, kepastian regulasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Dengan langkah tersebut, investasi dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan membantu mengurangi ketergantungan pembangunan terhadap pembiayaan APBD.

Pada akhirnya, keseluruhan berita menunjukkan bahwa perekonomian global, Indonesia, dan Jawa Tengah berada dalam satu rangkaian kondisi yang saling berkaitan. Konflik geopolitik dan gangguan energi di tingkat internasional dapat meningkatkan harga minyak dan inflasi global, kemudian memengaruhi kebijakan suku bunga serta arus modal dunia. Perubahan tersebut selanjutnya dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar dan biaya impor Indonesia, yang kemudian berdampak pada APBN, inflasi, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tekanan ekonomi nasional pada akhirnya juga dapat memengaruhi daerah, termasuk Jawa Tengah, sehingga penguatan investasi dan sektor-sektor produktif menjadi semakin penting. Meskipun menghadapi berbagai risiko, Indonesia dan Jawa Tengah masih memiliki peluang untuk mempertahankan pertumbuhan melalui penguatan penerimaan negara, pengelolaan fiskal yang hati-hati, hilirisasi, peningkatan investasi, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Dengan demikian, tantangan utama ke depan adalah menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung secara stabil dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa perekonomian memiliki ketahanan yang cukup untuk menghadapi ketidakpastian global yang berasal dari konflik geopolitik, energi, perdagangan, suku bunga, dan perubahan kondisi pasar keuangan internasional.

Ringkasan

- Perekonomian global masih menghadapi tekanan besar akibat meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan energi dunia, terutama karena gangguan terhadap Selat Hormuz dapat menghambat distribusi minyak dan memperbesar risiko penurunan pasokan energi global. Kondisi tersebut kemudian berpotensi mendorong kenaikan harga minyak, meningkatkan biaya transportasi dan produksi, serta memperkuat tekanan inflasi di berbagai negara, sehingga konflik geopolitik tidak hanya berdampak pada keamanan kawasan tetapi juga berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi dan pasar keuangan dunia.
- Kenaikan harga energi dan meningkatnya tekanan inflasi membuat bank sentral di berbagai negara menghadapi dilema dalam menentukan kebijakan moneter karena mereka harus menjaga stabilitas harga tanpa semakin menekan pertumbuhan ekonomi. Amerika Serikat menjadi salah satu pusat perhatian karena perkembangan inflasi konsumen dan produsen akan memengaruhi arah kebijakan The Fed, sementara kenaikan harga energi berpotensi memperkuat tekanan harga meskipun penurunan harga bensin dapat memberikan sedikit ruang bagi konsumen. Kondisi tersebut menyebabkan keputusan mengenai suku bunga menjadi semakin sulit karena kebijakan yang terlalu ketat dapat memperlambat ekonomi, sedangkan pelonggaran yang terlalu cepat dapat kembali meningkatkan inflasi.

- Perlambatan ekonomi China turut menjadi perhatian penting karena pertumbuhan ekonomi negara tersebut diperkirakan melemah akibat masih lemahnya konsumsi domestik dan investasi swasta, terutama karena tekanan yang berasal dari sektor properti dan ketidakpastian ekonomi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah China berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga melalui peningkatan pendapatan, perluasan layanan publik, serta pengembangan konsumsi berbasis teknologi, digitalisasi, kecerdasan buatan, dan ekonomi hijau. Namun, apabila konsumsi domestik belum mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan, China masih akan bergantung pada ekspor, sementara ketegangan perdagangan dan kebijakan tarif dari negara lain dapat menjadi hambatan bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonominya.
- Negara-negara Asia lainnya juga berupaya memperkuat perekonomian domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap kondisi eksternal yang semakin tidak pasti. Korea Selatan mendorong pengembangan industri chip, pusat data, dan kecerdasan buatan sebagai sumber pertumbuhan baru, sedangkan Jepang berupaya memperkuat pasar keuangan domestik melalui peningkatan investasi dana pensiun. Di sisi lain, India menghadapi tekanan terhadap nilai tukarnya karena kenaikan harga energi dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dapat memperbesar beban impor, sehingga perkembangan ekonomi negara-negara Asia secara umum menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat konsumsi, investasi, teknologi, dan kapasitas domestik dalam menghadapi gejolak energi, perdagangan, dan arus modal global.
- Dampak ketidakpastian ekonomi global turut dirasakan oleh Indonesia melalui tekanan terhadap nilai tukar, harga energi, kondisi fiskal, dan prospek pertumbuhan ekonomi, meskipun fundamental ekonomi nasional masih dinilai cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berada di sekitar 5% dan peringkat kredit nasional masih berada pada tingkat investment grade dengan outlook stabil, yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki daya tahan terhadap tekanan eksternal. Namun, pelemahan rupiah akibat meningkatnya risiko global, tingginya imbal hasil aset Amerika Serikat, kenaikan harga minyak, dan kekhawatiran terhadap neraca pembayaran tetap menjadi tantangan yang perlu diwaspadai.
- Pelemahan rupiah kemudian dapat meningkatkan biaya impor dan beban pembayaran utang luar negeri, terutama ketika Indonesia harus menghadapi kenaikan harga energi global. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN karena kenaikan harga minyak dapat memperbesar biaya impor energi dan kebutuhan belanja terkait energi, sementara depresiasi rupiah dapat meningkatkan nilai kewajiban pemerintah dalam valuta asing. Akibatnya, defisit APBN diperkirakan dapat melebar sehingga kebutuhan pembiayaan negara meningkat dan pemerintah perlu menjaga agar tambahan utang tetap digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kapasitas penerimaan negara.
- Di tengah tekanan fiskal tersebut, kinerja penerimaan pajak menunjukkan perkembangan yang positif karena penerimaan pajak bersih mengalami pertumbuhan dan tax buoyancy meningkat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kapasitas perpajakan Indonesia mulai semakin didukung oleh perbaikan administrasi, digitalisasi, pengawasan, dan perluasan basis pajak, bukan hanya bergantung pada kenaikan harga komoditas. Pengaktifan kembali wajib pajak yang sebelumnya tidak aktif juga menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperluas sumber penerimaan negara, sehingga peningkatan kualitas administrasi perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ketahanan fiskal Indonesia.
- Meskipun penerimaan negara menunjukkan perbaikan, kondisi konsumsi masyarakat perlu mendapat perhatian karena tingkat kepercayaan konsumen mengalami penurunan. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam menilai kondisi pendapatan, lapangan kerja, dan prospek ekonomi ke depan, sehingga keputusan untuk membeli barang tahan lama dan melakukan konsumsi dalam jumlah besar dapat tertunda. Apabila kondisi ini berlangsung lebih lama, pelemahan konsumsi rumah tangga dapat

memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi karena konsumsi merupakan salah satu komponen utama yang menopang perekonomian Indonesia.

- Untuk memperkuat pertumbuhan jangka panjang, pemerintah terus mendorong investasi dan hilirisasi melalui pengembangan proyek di sektor pertambangan, energi, pangan, biofuel, perkebunan, dan peternakan. Pengembangan proyek-proyek tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, memperkuat industri domestik, serta menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi komoditas Indonesia, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai industri yang lebih panjang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
- Di Jawa Tengah, perkembangan ekonomi menunjukkan bahwa investasi semakin penting untuk menjaga pertumbuhan dan pembangunan daerah karena kemampuan APBD dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan menghadapi berbagai keterbatasan. Realisasi investasi yang cukup besar menunjukkan bahwa Jawa Tengah masih memiliki daya tarik bagi investor dan memiliki potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan. Investasi tersebut menjadi penting karena tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan alternatif ketika ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas.
- Besarnya penyerapan tenaga kerja dari investasi menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Jawa Tengah tidak hanya diukur dari nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuan investasi tersebut menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan infrastruktur, kepastian regulasi, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut diperlukan agar investasi yang masuk dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan dan mampu memperkuat struktur perekonomian daerah.
- Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Jawa Tengah tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi nasional dan global karena perubahan harga energi, nilai tukar, suku bunga, perdagangan, dan arus investasi internasional pada akhirnya dapat memengaruhi kegiatan usaha di daerah. Oleh karena itu, penguatan investasi, pengembangan sektor produktif, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan menjadi langkah penting bagi Jawa Tengah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan tekanan terhadap keuangan pemerintah.

Implikasi

- Meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran serta potensi gangguan terhadap Selat Hormuz dapat menimbulkan implikasi besar terhadap stabilitas ekonomi global karena jalur tersebut memiliki peran penting dalam perdagangan energi dunia. Apabila gangguan terhadap distribusi minyak terus berlangsung, pasokan energi global dapat berkurang dan mendorong kenaikan harga minyak, sehingga biaya transportasi, produksi, dan distribusi barang di berbagai negara ikut meningkat. Kenaikan biaya tersebut kemudian dapat memperkuat tekanan inflasi global dan mengurangi daya beli masyarakat, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi, sehingga konflik geopolitik berpotensi berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih luas.
- Kenaikan harga minyak dan meningkatnya risiko inflasi akan membuat bank sentral di berbagai negara menghadapi dilema kebijakan yang semakin kompleks karena mereka harus menyeimbangkan kebutuhan untuk mengendalikan inflasi dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Jika bank sentral mempertahankan atau menaikkan suku bunga untuk meredam tekanan harga, biaya pinjaman bagi rumah tangga dan dunia usaha akan meningkat sehingga konsumsi dan investasi dapat melambat. Sebaliknya, apabila bank sentral melonggarkan

kebijakan terlalu cepat untuk mendukung pertumbuhan, tekanan inflasi yang berasal dari energi dapat kembali meningkat, sehingga ketidakpastian arah kebijakan moneter global berpotensi memperbesar volatilitas pasar keuangan dan arus modal internasional.

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi China dapat memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian dunia karena China merupakan salah satu pusat utama perdagangan, manufaktur, dan permintaan komoditas global. Melemahnya konsumsi domestik dan investasi swasta dapat mengurangi permintaan terhadap bahan baku dan produk dari negara-negara mitra dagang, sehingga berpotensi menekan ekspor negara lain yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan China. Kondisi tersebut kemudian dapat mendorong pemerintah China untuk memperkuat stimulus fiskal dan meningkatkan konsumsi domestik, tetapi apabila kebijakan tersebut belum mampu mengatasi tekanan sektor properti dan lemahnya kepercayaan masyarakat, perlambatan ekonomi China tetap dapat menjadi salah satu sumber risiko terhadap pertumbuhan global.
- Persaingan negara-negara Asia dalam mengembangkan industri chip, pusat data, kecerdasan buatan, dan teknologi strategis menunjukkan bahwa struktur ekonomi global semakin bergerak menuju persaingan berbasis teknologi dan inovasi. Negara yang mampu menguasai teknologi tersebut berpotensi memperoleh investasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperkuat posisi dalam rantai pasok global. Sebaliknya, negara yang tertinggal dalam pengembangan teknologi berisiko semakin bergantung pada impor teknologi dan kehilangan peluang untuk memperoleh nilai tambah yang lebih besar, sehingga perkembangan ini menuntut negara-negara berkembang untuk memperkuat pendidikan, keterampilan digital, infrastruktur teknologi, serta kapasitas industri domestik.
- Meningkatnya ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan, dan volatilitas harga energi juga berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan negara-negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Negara yang terlalu bergantung pada satu sumber energi, satu pasar ekspor, atau satu rantai pasok akan lebih rentan terhadap gangguan eksternal, sehingga diversifikasi sumber energi, pasar perdagangan, dan pemasok bahan baku menjadi semakin penting. Dengan demikian, perkembangan ekonomi internasional mendorong negara-negara untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi agar mampu menghadapi guncangan geopolitik dan perdagangan yang dapat terjadi secara tiba-tiba.
- Tekanan geopolitik dan kenaikan harga energi global berpotensi memberikan dampak langsung terhadap Indonesia karena pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dapat meningkatkan biaya impor, terutama untuk kebutuhan energi. Ketika harga minyak global meningkat dan nilai tukar rupiah melemah, biaya pengadaan energi dalam rupiah akan menjadi lebih mahal, sehingga dapat meningkatkan tekanan terhadap harga bahan bakar, transportasi, dan berbagai barang yang menggunakan energi sebagai input produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kebijakan stabilisasi yang tepat.
- Pelemahan rupiah juga berimplikasi terhadap kondisi fiskal karena meningkatnya nilai tukar dolar AS dapat memperbesar beban pembayaran utang luar negeri pemerintah serta meningkatkan kebutuhan pembiayaan dalam rupiah. Apabila tekanan terhadap rupiah berlangsung lama, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut, sehingga ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan lainnya dapat menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar menjadi penting bukan hanya bagi sektor keuangan, tetapi juga bagi kemampuan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan APBN dan membiayai pembangunan.
- Pelebaran defisit APBN akibat meningkatnya tekanan belanja dan kebutuhan pembiayaan dapat menimbulkan implikasi terhadap keberlanjutan fiskal apabila tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara. Meningkatnya kebutuhan utang dapat memperbesar beban pembayaran bunga pada masa mendatang dan mengurangi ruang pemerintah untuk membiayai

program prioritas. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembiayaan tambahan diarahkan pada kegiatan yang produktif dan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga utang yang meningkat dapat diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi dan penerimaan negara.

- Pertumbuhan penerimaan pajak dan peningkatan tax buoyancy memberikan implikasi positif terhadap ketahanan fiskal Indonesia karena menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan penerimaan melalui perbaikan administrasi dan perluasan basis pajak. Apabila digitalisasi perpajakan, pengawasan, dan pengaktifan kembali wajib pajak dapat terus diperkuat, ketergantungan terhadap penerimaan komoditas dan pembiayaan utang dapat dikurangi. Namun, peningkatan penerimaan tetap perlu dilakukan secara seimbang agar tidak memberikan beban berlebihan kepada masyarakat dan dunia usaha yang pada saat yang sama menghadapi tekanan daya beli serta ketidakpastian ekonomi.
- Penurunan kepercayaan konsumen berpotensi memberikan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang semakin berhati-hati cenderung menunda pembelian barang tahan lama dan mengurangi pengeluaran yang tidak bersifat mendesak. Jika kecenderungan tersebut berlanjut, konsumsi rumah tangga dapat mengalami perlambatan dan memberikan tekanan terhadap aktivitas perdagangan, industri, serta sektor jasa. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga, memperkuat penciptaan lapangan kerja, dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi mampu menjaga pendapatan riil masyarakat agar konsumsi tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
- Dorongan terhadap hilirisasi dan investasi memiliki implikasi strategis bagi Indonesia karena dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri domestik, dan menciptakan lapangan kerja. Pengolahan bahan mentah di dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah yang rentan terhadap perubahan harga global, sekaligus meningkatkan peluang Indonesia untuk masuk ke rantai pasok industri yang lebih bernilai tinggi. Namun, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur, energi, teknologi, tenaga kerja terampil, kepastian hukum, dan kemampuan pemerintah memastikan bahwa investasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
- Pengembangan sektor hilirisasi juga berpotensi meningkatkan pemerataan ekonomi apabila proyek investasi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi mampu menciptakan keterkaitan dengan usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja lokal. Dengan adanya keterkaitan tersebut, investasi besar dapat memberikan dampak yang lebih luas melalui peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan pemasok domestik, dan pertumbuhan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan industri. Oleh karena itu, kebijakan investasi perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan nilai investasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat dirasakan secara luas.
- Bagi Jawa Tengah, ketidakpastian ekonomi global dan tekanan fiskal nasional semakin menegaskan pentingnya investasi sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika kemampuan APBD menghadapi keterbatasan, investasi dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada belanja pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan Jawa Tengah dalam menarik dan mempertahankan investasi menjadi semakin penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
- Besarnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa investasi memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian Jawa Tengah, tetapi manfaat tersebut sangat bergantung pada kualitas investasi yang masuk. Investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, menggunakan tenaga kerja lokal, melibatkan pelaku usaha daerah, dan membangun rantai pasok domestik akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mengarahkan investasi

tidak hanya berdasarkan besarnya nilai modal yang masuk, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas masyarakat.

- Peningkatan investasi di Jawa Tengah juga menuntut pemerintah daerah untuk terus memperbaiki iklim usaha melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas infrastruktur, kepastian regulasi, dan penyediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Apabila kebutuhan industri tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang sesuai, sebagian manfaat investasi dapat berkurang karena perusahaan harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan peningkatan keterampilan digital menjadi bagian penting agar masyarakat Jawa Tengah dapat memperoleh manfaat langsung dari masuknya investasi.
- Perubahan ekonomi global yang berdampak pada harga energi, nilai tukar, dan biaya produksi juga berpotensi memengaruhi dunia usaha di Jawa Tengah, terutama industri yang bergantung pada bahan baku impor atau energi dalam jumlah besar. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi, sementara kenaikan harga energi dapat meningkatkan biaya operasional dan distribusi. Kondisi tersebut dapat menekan daya saing perusahaan dan meningkatkan harga barang, sehingga pemerintah daerah perlu mendorong efisiensi, diversifikasi sektor ekonomi, serta penguatan industri yang menggunakan bahan baku lokal agar perekonomian daerah tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal.

Berita Selasa, 14 Juli

Kesimpulan

Secara keseluruhan, berita-berita internasional menunjukkan bahwa kondisi perekonomian dunia pada pertengahan Juli 2026 dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Booming AI berhasil mendorong permintaan global terhadap semikonduktor, perangkat elektronik, dan pembangunan pusat data sehingga perdagangan internasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut terlihat dari melonjaknya ekspor dan impor China yang berhasil melampaui seluruh proyeksi para ekonom karena tingginya permintaan terhadap cip dan perangkat pendukung AI. Selain itu, Korea Selatan juga memperoleh manfaat dari meningkatnya ekspor semikonduktor sehingga pemerintah menaikkan target pertumbuhan ekonominya menjadi 3% sekaligus memperbesar investasi pada sektor AI. Singapura pun masih mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, meskipun lajunya mulai melambat akibat meningkatnya ketidakpastian global dan terganggunya aktivitas perdagangan karena konflik Timur Tengah. Dengan demikian, perkembangan AI telah menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi dunia, namun manfaat tersebut belum mampu sepenuhnya menghilangkan risiko yang berasal dari kondisi geopolitik internasional.

Di sisi lain, konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin memperbesar tekanan terhadap perekonomian global. Ketegangan yang kembali meningkat di Selat Hormuz menyebabkan harga minyak dunia melonjak karena jalur tersebut merupakan salah satu jalur distribusi energi paling penting di dunia. Kondisi tersebut diperparah oleh kebijakan Presiden Donald Trump yang berencana memberlakukan tarif sebesar 20% terhadap seluruh kargo yang melewati Selat Hormuz serta kembali melakukan blokade terhadap kapal-kapal Iran. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya biaya logistik internasional, terganggunya distribusi energi, serta naiknya harga minyak dunia yang pada akhirnya dapat mendorong inflasi di berbagai negara. Akibat situasi tersebut, para pelaku pasar menjadi lebih berhati-hati sehingga pergerakan nilai tukar, harga komoditas, dan pasar keuangan global mengalami volatilitas yang cukup tinggi.

Meningkatnya harga energi akibat konflik tersebut kemudian berdampak langsung terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat. Meskipun inflasi AS diperkirakan mulai melambat dibandingkan bulan sebelumnya, tekanan inflasi inti masih dinilai cukup tinggi sehingga Federal Reserve tetap membuka peluang untuk menaikkan suku bunga apabila tekanan harga belum menunjukkan penurunan yang konsisten. Para pejabat The Fed menilai bahwa inflasi yang masih tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi apabila tidak segera dikendalikan. Oleh karena itu, kebijakan suku bunga masih akan sangat bergantung pada perkembangan data inflasi dalam beberapa bulan ke depan. Situasi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi global masih menghadapi tantangan besar karena harus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya pengendalian inflasi.

Sementara itu, kondisi ekonomi Indonesia juga tidak terlepas dari dampak perkembangan global tersebut. Pelemahan nilai tukar rupiah hingga berada di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat menjadi perhatian utama pemerintah dan DPR karena berpotensi meningkatkan biaya impor bahan baku industri, memperbesar tekanan inflasi, serta menambah beban subsidi energi dalam APBN. Meskipun demikian, pemerintah dan Bank Indonesia tetap optimistis bahwa nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring membaiknya arus modal asing setelah Standard & Poor's mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level investment grade dengan prospek stabil. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dinilai cukup baik dan mampu menjaga kepercayaan investor di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Walaupun memperoleh penilaian positif dari lembaga pemeringkat internasional, berbagai indikator ekonomi nasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai kehilangan momentum. Aktivitas sektor manufaktur mengalami kontraksi yang ditandai dengan menurunnya produksi, pesanan baru, serta pemanfaatan kapasitas industri. Pada saat yang sama, indeks keyakinan konsumen juga mengalami penurunan sehingga masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi. Kondisi tersebut kemudian tercermin pada menurunnya penjualan ritel di berbagai kelompok barang, baik kebutuhan pokok maupun barang tahan lama. Pelemahan konsumsi masyarakat menjadi perhatian serius karena konsumsi rumah tangga selama ini merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, tekanan inflasi juga masih cukup tinggi akibat kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Oleh sebab itu, pemerintah menghadapi tantangan yang cukup besar untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar tetap berada pada jalur yang diharapkan.

Di bidang fiskal, pemerintah menegaskan bahwa kondisi keuangan negara masih berada dalam batas yang aman meskipun nilai utang terus meningkat. Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto masih berada jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan undang-undang sehingga pemerintah optimistis keberlanjutan fiskal tetap dapat dijaga. Untuk mengelola kewajiban tersebut, pemerintah menerapkan berbagai strategi seperti rollover utang, pengelolaan portofolio secara aktif, optimalisasi penerimaan negara, serta peningkatan kualitas belanja pemerintah. Di sisi lain, lembaga pemeringkat S&P tetap mengingatkan bahwa risiko global, pelemahan rupiah, serta ketidakpastian geopolitik masih dapat memberikan tekanan terhadap pembiayaan negara apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus menjaga disiplin fiskal agar stabilitas ekonomi nasional tetap terpelihara.

Di tingkat Jawa Tengah, berbagai pemberitaan menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperkuat perekonomian melalui peningkatan investasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah. Upaya tersebut terlihat dari peninjauan kerja sama antara IOA Global Singapura dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tidak hanya berfokus pada investasi manufaktur berteknologi tinggi, tetapi juga mencakup pendidikan vokasi, pertukaran mahasiswa dan dosen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyatakan kesiapan memberikan kemudahan perizinan, kepastian investasi, serta dukungan kawasan

industri dan Balai Latihan Kerja agar mampu menarik lebih banyak investor dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Selain mendorong investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis masyarakat melalui Program Desa Dampingan. Program tersebut terbukti memberikan dampak positif di Desa Ayamputih, Kabupaten Kebumen, yang mulai mampu keluar dari jerat kemiskinan setelah memperoleh pendampingan selama dua tahun. Berbagai bantuan berupa pengembangan UMKM, peternakan ayam petelur, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi, bantuan modal usaha, hingga kemitraan dengan PT Jateng Agro Berdikari berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan Magelang Fair 2026 juga berhasil meningkatkan transaksi UMKM dan memperkuat posisi Kota Magelang sebagai kota perdagangan dan jasa, sedangkan sektor pertanian di Kabupaten Rembang menunjukkan prospek yang sangat baik dengan luas tanam tembakau mencapai 7.440 hektare dan perputaran ekonomi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp455 miliar selama satu musim tanam. Seluruh capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Jawa Tengah tidak hanya diarahkan pada peningkatan investasi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, pengembangan sektor pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Ringkasan

- Kondisi perekonomian global pada pertengahan Juli 2026 masih dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pesatnya perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Perkembangan AI berhasil meningkatkan permintaan dunia terhadap semikonduktor, perangkat elektronik, serta pembangunan pusat data sehingga mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. China menjadi salah satu negara yang memperoleh manfaat terbesar dengan mencatat lonjakan ekspor dan impor yang melampaui perkiraan, sedangkan Korea Selatan juga menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonominya karena kuatnya ekspor semikonduktor dan meningkatnya investasi pada sektor AI. Di sisi lain, Singapura masih mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi meskipun mulai menghadapi perlambatan akibat meningkatnya ketidakpastian global dan melemahnya aktivitas perdagangan internasional.
- Peningkatan permintaan terhadap produk-produk teknologi juga menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi salah satu faktor utama yang menggerakkan perekonomian dunia. Negara-negara yang mampu mengembangkan industri teknologi tinggi memperoleh keuntungan melalui peningkatan ekspor, masuknya investasi asing, serta berkembangnya industri berbasis inovasi. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa daya saing ekonomi suatu negara semakin ditentukan oleh kemampuan dalam mengembangkan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas.
- Selain perkembangan teknologi, konflik antara Amerika Serikat dan Iran menjadi perhatian utama dunia karena berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global. Ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz menyebabkan harga minyak dunia mengalami kenaikan akibat kekhawatiran terhadap terganggunya distribusi energi internasional. Situasi tersebut semakin diperburuk oleh kebijakan Presiden Donald Trump yang berencana mengenakan tarif terhadap seluruh kargo yang melewati Selat Hormuz serta memperketat tekanan terhadap Iran. Akibatnya, biaya logistik dunia berpotensi meningkat, inflasi global kembali memperoleh tekanan, serta ketidakpastian pasar keuangan internasional semakin tinggi.
- Di Amerika Serikat sendiri, perhatian pasar masih tertuju pada perkembangan inflasi dan kebijakan suku bunga Federal Reserve. Meskipun inflasi diperkirakan mulai mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya, tekanan harga masih cukup tinggi sehingga

Federal Reserve tetap mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan tersebut diperkirakan akan memengaruhi arus modal global, nilai tukar berbagai mata uang, serta kondisi pasar keuangan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

- Secara umum, berita internasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia masih memiliki peluang untuk berkembang melalui kemajuan teknologi dan perdagangan global. Namun, peluang tersebut masih dibayangi oleh konflik geopolitik, tingginya harga energi, inflasi, serta ketidakpastian kebijakan ekonomi yang membuat prospek perekonomian dunia masih memerlukan kewaspadaan dari seluruh negara.
- Kondisi ekonomi Indonesia pada periode tersebut masih menunjukkan fundamental yang cukup kuat meskipun menghadapi tekanan dari dinamika ekonomi global. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi perhatian utama karena berdampak pada meningkatnya biaya impor, harga bahan baku industri, serta tekanan inflasi di dalam negeri. Namun demikian, pemerintah bersama Bank Indonesia tetap optimistis bahwa stabilitas ekonomi dapat dijaga melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal serta upaya menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.
- Kepercayaan investor terhadap Indonesia masih tetap terjaga setelah lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level investment grade dengan prospek stabil. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih dinilai cukup baik, rasio utang pemerintah tetap terkendali, serta kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban keuangannya masih berada pada tingkat yang aman. Meskipun demikian, pemerintah tetap diminta untuk mewaspadaai berbagai risiko global yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
- Sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan adanya perlambatan aktivitas ekonomi yang ditandai dengan menurunnya kinerja sektor manufaktur, melemahnya penjualan ritel, serta menurunnya tingkat keyakinan konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mulai mengalami tekanan akibat tingginya biaya hidup dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi, memperkuat sektor industri, serta mengendalikan inflasi agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.
- Dari sisi pengelolaan keuangan negara, pemerintah menegaskan bahwa posisi utang Indonesia masih berada dalam batas aman dan dikelola secara hati-hati melalui berbagai strategi pembiayaan. Pemerintah juga terus meningkatkan penerimaan negara, menjaga efisiensi belanja, serta mengoptimalkan pengelolaan fiskal agar mampu menghadapi tekanan ekonomi global sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
- Berita nasional juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan berbagai lembaga ekonomi dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat sistem keuangan nasional, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif agar perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh di tengah ketidakpastian global.
- Secara keseluruhan, pemberitaan nasional menggambarkan bahwa Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat. Namun, pemerintah tetap perlu meningkatkan produktivitas sektor industri, menjaga daya beli masyarakat, memperkuat investasi, serta meningkatkan daya saing ekonomi agar mampu menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
- Berbagai berita di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor pertanian. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penajakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan IOA Global Singapura yang berfokus pada investasi manufaktur berteknologi tinggi, pengembangan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan kesempatan kerja. Langkah

tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri Jawa Tengah sekaligus menarik lebih banyak investasi pada masa mendatang.

- Kerja sama tersebut juga memperlihatkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui penyediaan kawasan industri, kemudahan perizinan, serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, investor, dan lembaga pendidikan, pembangunan industri di Jawa Tengah diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis masyarakat melalui Program Desa Dampingan yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ayamputih, Kabupaten Kebumen. Program tersebut mencakup pengembangan UMKM, bantuan usaha peternakan, pembangunan infrastruktur, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta peningkatan sanitasi sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
- Di sektor perdagangan dan UMKM, penyelenggaraan Magelang Fair 2026 berhasil meningkatkan transaksi ekonomi serta memperluas promosi produk-produk lokal. Kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat peran sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain meningkatkan transaksi ekonomi, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM Jawa Tengah.
- Pada sektor pertanian, Kabupaten Rembang menunjukkan perkembangan yang positif melalui meningkatnya produksi tembakau yang diperkirakan mampu menghasilkan perputaran ekonomi hingga ratusan miliar rupiah. Kondisi tersebut memberikan manfaat bagi petani, pedagang, dan pelaku usaha pendukung lainnya sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Pemerintah daerah juga terus memberikan pendampingan kepada petani agar produktivitas dan kualitas hasil pertanian dapat terus meningkat.
- Berbagai program pembangunan di Jawa Tengah juga menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui investasi berskala besar, tetapi juga melalui pemberdayaan desa, penguatan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, serta pengembangan sektor pertanian. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.
- Secara keseluruhan, pemberitaan Jawa Tengah menggambarkan bahwa pembangunan daerah diarahkan pada penguatan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, serta optimalisasi potensi pertanian dan perdagangan. Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Implikasi

- Perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence (AI) yang mendorong meningkatnya permintaan terhadap semikonduktor, perangkat elektronik, dan pembangunan pusat data memberikan implikasi positif terhadap pertumbuhan perdagangan global. Negara-negara yang memiliki industri teknologi maju seperti China, Korea Selatan, dan Singapura memperoleh manfaat berupa peningkatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi tersebut juga menyebabkan persaingan teknologi antarnegara semakin ketat sehingga negara yang belum mampu mengembangkan industri digital dan teknologi tinggi berpotensi tertinggal dalam persaingan ekonomi global. Akibatnya, setiap negara dituntut untuk meningkatkan

investasi pada sektor teknologi, inovasi, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia agar mampu mengikuti transformasi ekonomi berbasis digital.

- Meningkatnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran memberikan implikasi yang cukup besar terhadap stabilitas ekonomi dunia karena ketegangan di kawasan Timur Tengah menyebabkan harga minyak dunia mengalami kenaikan dan memperbesar risiko terganggunya jalur distribusi energi internasional melalui Selat Hormuz. Apabila kondisi tersebut terus berlanjut, maka biaya transportasi, logistik, dan produksi di berbagai negara akan meningkat sehingga mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara global. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah meningkatnya tekanan inflasi, menurunnya aktivitas perdagangan internasional, serta melemahnya kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian dunia.
- Kebijakan moneter Amerika Serikat yang masih membuka peluang kenaikan suku bunga sebagai respons terhadap tekanan inflasi memberikan implikasi terhadap pergerakan arus modal internasional. Tingginya suku bunga di Amerika Serikat akan mendorong investor global mengalihkan investasinya ke aset-aset berdenominasi dolar AS sehingga negara-negara berkembang berpotensi mengalami arus keluar modal (capital outflow), pelemahan nilai tukar mata uang, serta meningkatnya biaya pembiayaan luar negeri. Kondisi tersebut mengharuskan banyak negara untuk memperkuat fundamental ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan kepercayaan investor agar tidak mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar.
- Meningkatnya ketidakpastian ekonomi global juga memberikan implikasi terhadap aktivitas perdagangan internasional karena pelaku usaha cenderung menunda ekspansi bisnis dan investasi hingga kondisi geopolitik kembali stabil. Akibatnya, pertumbuhan perdagangan dunia berpotensi melambat dan berdampak pada negara-negara yang bergantung pada ekspor sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonominya.
- Perubahan kondisi ekonomi global juga mendorong berbagai negara untuk melakukan diversifikasi mitra dagang dan rantai pasok agar tidak terlalu bergantung pada satu kawasan tertentu. Langkah tersebut menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan produksi dan mengurangi risiko gangguan distribusi apabila terjadi konflik atau hambatan perdagangan di masa mendatang.
- Ketidakstabilan harga energi dunia memberikan implikasi terhadap meningkatnya biaya operasional industri di berbagai negara. Perusahaan-perusahaan harus melakukan efisiensi biaya produksi serta mencari sumber energi alternatif agar tetap mampu menjaga daya saing di tengah kenaikan harga minyak dan gas dunia.
- Kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian memberikan implikasi langsung terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya impor, serta naiknya harga bahan baku industri. Pelemahan rupiah menyebabkan perusahaan yang masih bergantung pada bahan baku impor harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih tinggi sehingga harga barang di dalam negeri ikut meningkat. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, maka daya beli masyarakat dapat semakin melemah dan pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi mengalami perlambatan.
- Dipertahankannya peringkat utang Indonesia pada level investment grade oleh Standard & Poor's memberikan implikasi positif terhadap kepercayaan investor internasional karena menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dinilai cukup baik. Kepercayaan tersebut berpotensi meningkatkan arus investasi asing, memperluas kesempatan kerja, memperkuat stabilitas pasar keuangan, serta membantu pemerintah memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih kompetitif. Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu menjaga disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi makro agar kepercayaan tersebut dapat dipertahankan di tengah meningkatnya risiko ekonomi global.
- Menurunnya aktivitas manufaktur, melemahnya penjualan ritel, serta berkurangnya keyakinan konsumen memberikan implikasi bahwa permintaan domestik mulai mengalami perlambatan.

Apabila konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi terus menurun, maka dunia usaha akan mengurangi kapasitas produksi, investasi baru akan melambat, serta peluang penciptaan lapangan kerja menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, peningkatan kesempatan kerja, serta pemberian stimulus kepada sektor-sektor produktif.

- Pengelolaan utang negara yang masih berada dalam batas aman memberikan implikasi bahwa pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Namun demikian, meningkatnya ketidakpastian global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan biaya pinjaman internasional mengharuskan pemerintah semakin berhati-hati dalam mengelola pembiayaan negara agar tidak menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan fiskal pada masa mendatang. Oleh sebab itu, peningkatan penerimaan negara, efisiensi belanja pemerintah, serta pengelolaan utang yang lebih produktif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
- Melemahnya daya beli masyarakat memberikan implikasi terhadap penurunan permintaan barang dan jasa di berbagai sektor ekonomi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaku usaha mengurangi produksi, melakukan efisiensi biaya operasional, bahkan menunda perekrutan tenaga kerja baru sehingga tingkat pengangguran berpotensi meningkat apabila kondisi ekonomi tidak segera membaik.
- Perkembangan kondisi ekonomi global menjadi pengingat bahwa Indonesia perlu memperkuat struktur ekonomi domestik melalui peningkatan hilirisasi industri, pengembangan sektor manufaktur, serta peningkatan nilai tambah produk dalam negeri. Dengan struktur ekonomi yang lebih kuat, Indonesia akan lebih mampu menghadapi tekanan ekonomi global tanpa terlalu bergantung pada kondisi pasar internasional.
- Meningkatnya tekanan ekonomi juga memberikan implikasi terhadap perlunya sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Koordinasi kebijakan yang baik akan membantu menjaga inflasi, nilai tukar rupiah, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Rencana kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan IOA Global memberikan implikasi yang cukup besar terhadap peningkatan investasi dan kualitas sumber daya manusia di daerah. Apabila kerja sama tersebut dapat direalisasikan secara optimal, maka akan tercipta peluang masuknya investasi baru pada sektor manufaktur berteknologi tinggi yang mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas industri, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, kolaborasi dalam bidang pendidikan vokasi dan pertukaran mahasiswa maupun dosen juga akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja Jawa Tengah sehingga lebih siap menghadapi kebutuhan industri modern yang semakin berbasis teknologi.
- Keberhasilan Program Desa Dampungan di Desa Ayamputih, Kabupaten Kebumen memberikan implikasi bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan mampu menjadi solusi efektif dalam mengurangi kemiskinan. Pendampungan yang mencakup pengembangan UMKM, bantuan usaha peternakan, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kualitas lingkungan terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi desa. Keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Tengah untuk menerapkan pola pembangunan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
- Keberhasilan penyelenggaraan Magelang Fair 2026 memberikan implikasi positif terhadap perkembangan UMKM dan perekonomian lokal karena kegiatan tersebut mampu meningkatkan transaksi perdagangan, memperluas promosi produk daerah, serta

mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen maupun investor. Apabila kegiatan serupa terus dilaksanakan secara konsisten, maka daya saing UMKM akan semakin meningkat, kesempatan usaha baru akan semakin terbuka, serta kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin besar.

- Prospek produksi tembakau di Kabupaten Rembang yang diperkirakan menghasilkan perputaran ekonomi hingga ratusan miliar rupiah memberikan implikasi terhadap meningkatnya pendapatan petani, aktivitas perdagangan hasil pertanian, serta perputaran ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Namun demikian, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi berbagai risiko seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta kebijakan nasional mengenai industri hasil tembakau agar keberlanjutan sektor pertanian tetap terjaga. Oleh karena itu, penguatan teknologi pertanian, pendampingan kepada petani, serta diversifikasi komoditas menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pendapatan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
- Meningkatnya investasi dan berkembangnya sektor UMKM di Jawa Tengah juga memberikan implikasi terhadap meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta kerja sama dengan dunia usaha agar kualitas sumber daya manusia mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.
- Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Sinergi tersebut tidak hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Berita Rabu, 15 Juli

Kesimpulan

Perekonomian global pada saat ini menunjukkan bahwa dunia masih berada dalam fase ketidakpastian yang tinggi akibat kombinasi berbagai tekanan ekonomi, geopolitik, dan perubahan kebijakan moneter. Perlambatan ekonomi di sejumlah negara besar, masih tingginya risiko inflasi, konflik geopolitik yang belum mereda, serta perubahan arah kebijakan bank sentral menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi ekonomi internasional. Dana Moneter Internasional (IMF) menilai bahwa dunia sedang menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun sebelumnya karena berbagai krisis terjadi secara bersamaan, mulai dari dampak pandemi, krisis biaya hidup, ketegangan perdagangan, konflik di Ukraina dan Timur Tengah, hingga percepatan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Di tengah kondisi tersebut, IMF mengingatkan seluruh pemerintah agar tetap menjaga stabilitas harga, memperkuat kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter, meningkatkan ketahanan terhadap gangguan rantai pasok, serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan utang, penciptaan lapangan kerja, dan kerja sama internasional yang lebih erat. Pesan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perekonomian dunia masih mampu bertahan, tingkat ketidakpastian global diperkirakan masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang sehingga seluruh negara harus tetap waspada terhadap berbagai risiko yang dapat muncul sewaktu-waktu.

Di sisi lain, kondisi ekonomi China menunjukkan perlambatan yang cukup signifikan sehingga menjadi perhatian utama pasar global. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) China pada kuartal II tahun 2026 hanya mencapai 4,3 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan target pemerintah maupun proyeksi para ekonom, sekaligus menjadi laju pertumbuhan terendah dalam lebih dari tiga

tahun terakhir. Perlambatan tersebut dipicu oleh melemahnya investasi aset tetap, belum pulihnya permintaan domestik, rendahnya kepercayaan konsumen dan dunia usaha, serta masih besarnya ketidakpastian eksternal akibat ketegangan perdagangan internasional. Meskipun sektor manufaktur dan ekspor masih menunjukkan kinerja yang relatif baik, terutama didorong oleh meningkatnya permintaan global terhadap infrastruktur kecerdasan buatan (AI), manfaat pertumbuhan tersebut dinilai belum menyebar secara merata ke seluruh sektor ekonomi. Kondisi ini mendorong pemerintah China untuk mempertimbangkan berbagai langkah stimulus melalui percepatan belanja pemerintah dan peningkatan investasi infrastruktur agar target pertumbuhan ekonomi tahunan tetap dapat tercapai. Dengan demikian, perlambatan ekonomi China menjadi sinyal bahwa pemulihan ekonomi global masih menghadapi tantangan besar karena melemahnya salah satu mesin pertumbuhan ekonomi dunia.

Sementara itu, perkembangan ekonomi Amerika Serikat memberikan gambaran yang sedikit lebih positif karena inflasi pada bulan Juni tercatat mengalami penurunan untuk pertama kalinya dalam enam tahun terakhir. Penurunan harga bahan bakar menjadi faktor utama yang mendorong turunnya Indeks Harga Konsumen (IHK), sehingga memberikan sedikit ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha dari tekanan kenaikan harga yang selama ini terjadi. Kondisi tersebut juga mengurangi ekspektasi pasar terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) dalam waktu dekat. Meskipun demikian, Ketua The Fed Kevin Warsh menegaskan bahwa keberhasilan menurunkan inflasi bukan berarti tugas bank sentral telah selesai karena risiko inflasi masih dapat kembali meningkat apabila harga energi kembali naik atau terjadi gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik. Oleh karena itu, The Fed tetap membuka kemungkinan menggunakan instrumen suku bunga apabila tekanan inflasi kembali menguat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan moneter Amerika Serikat masih akan sangat bergantung pada perkembangan data ekonomi dan dinamika global sehingga arah suku bunga masih menjadi faktor penting yang memengaruhi pasar keuangan dunia.

Selain faktor ekonomi, situasi geopolitik juga menjadi perhatian besar dalam pemberitaan karena konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas sehingga meningkatkan ketidakpastian di pasar energi dunia. Ketegangan di kawasan Timur Tengah menyebabkan harga minyak mentah kembali naik akibat meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan distribusi energi melalui Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur perdagangan minyak paling penting di dunia. Kondisi tersebut membuat pasar keuangan global bergerak sangat dinamis karena di satu sisi inflasi Amerika Serikat mengalami perlambatan sehingga memberikan sentimen positif bagi pasar saham dan obligasi, tetapi di sisi lain kenaikan harga minyak berpotensi kembali mendorong inflasi pada bulan-bulan berikutnya. Oleh sebab itu, para investor masih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi karena arah kebijakan moneter dunia sangat bergantung pada perkembangan konflik geopolitik serta stabilitas harga energi global. Situasi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan geopolitik kini saling berkaitan erat sehingga setiap perkembangan konflik internasional dapat langsung memengaruhi kondisi pasar keuangan dunia.

Dampak perkembangan ekonomi global tersebut turut memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia, khususnya melalui pergerakan nilai tukar rupiah, pasar obligasi, serta prospek perdagangan internasional. Meskipun perlambatan inflasi Amerika Serikat memberikan sentimen positif terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, pelemahan ekonomi China tetap menjadi tantangan karena China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Penguatan rupiah pada perdagangan hari itu didukung oleh berkurangnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed, meningkatnya kepercayaan investor terhadap pasar obligasi Indonesia, serta stabilnya kebijakan moneter Bank Indonesia. Namun demikian, ruang penguatan rupiah masih terbatas karena pasar tetap mencermati perkembangan harga minyak dunia, arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat, serta kondisi geopolitik yang sewaktu-waktu dapat kembali meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar. Dengan demikian, stabilitas ekonomi Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga kepercayaan investor sekaligus memperkuat fundamental ekonomi domestik.

Di bidang pembiayaan negara, kondisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia masih menunjukkan struktur yang relatif sehat meskipun mengalami peningkatan menjadi sekitar US\$444,4 miliar atau setara Rp8.043,2 triliun. Kenaikan tersebut terutama berasal dari pemerintah dan Bank Indonesia yang memanfaatkan pembiayaan luar negeri untuk mendukung pembangunan nasional, menjaga stabilitas nilai tukar, serta memperkuat operasi moneter melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sebaliknya, sektor swasta masih cenderung menahan diri untuk menambah pembiayaan luar negeri karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil dan tingginya biaya pendanaan. Meskipun demikian, struktur utang Indonesia masih dinilai aman karena didominasi oleh utang jangka panjang dengan rasio terhadap PDB sekitar 29,9 persen, sehingga risiko pembiayaan ulang relatif rendah. Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi agar pengelolaan utang tetap dilakukan secara hati-hati, produktif, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengganggu stabilitas makroekonomi nasional.

Dari sisi pengelolaan keuangan negara, pemerintah kembali menunjukkan kinerja yang cukup baik melalui keberhasilan Kementerian Keuangan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk kelima belas kalinya secara berturut-turut. Pencapaian tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, pemerintah juga memperkirakan realisasi pendapatan negara mampu melampaui target APBN, terutama didukung oleh tingginya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sektor sumber daya alam. Namun demikian, para ekonom mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap penerimaan berbasis komoditas tidak dapat dijadikan sumber pendapatan jangka panjang karena sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dunia. Oleh sebab itu, pemerintah tetap perlu memperkuat basis perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menciptakan sumber penerimaan negara yang lebih berkelanjutan agar kondisi fiskal tetap sehat dalam jangka panjang.

Meskipun berbagai indikator makroekonomi Indonesia masih relatif stabil, prospek pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan menghadapi tantangan yang semakin besar pada beberapa tahun mendatang. Berbagai lembaga internasional seperti S&P Global Ratings, IMF, dan Asian Development Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan berada di kisaran lima persen, bahkan beberapa lembaga memperkirakan adanya perlambatan setelah tahun 2026. Faktor utama yang menjadi tantangan adalah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi mitra dagang utama, perubahan kebijakan perdagangan internasional, serta belum optimalnya investasi swasta. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat investasi produktif, mempercepat hilirisasi industri, meningkatkan daya saing nasional, memperluas kesempatan kerja, serta menjaga stabilitas kebijakan agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia ke depan memerlukan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan reformasi struktural agar mampu menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, pembangunan daerah difokuskan pada pemerataan pembangunan desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama TNI melalui Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) melaksanakan pembangunan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota dengan sasaran utama wilayah-wilayah terpencil yang masih memiliki keterbatasan akses infrastruktur. Program tersebut tidak hanya membangun jalan, jembatan, talud, serta berbagai sarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mengintegrasikan berbagai program sosial seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan, pencegahan stunting, penguatan ketahanan keluarga, pelatihan kewirausahaan, hingga pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon. Kehadiran program TMMD menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi

masyarakat, serta memperluas akses pelayanan publik sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat hingga wilayah pelosok.

Selain pembangunan infrastruktur desa, penguatan ekonomi masyarakat Jawa Tengah juga dilakukan melalui dukungan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bank Jateng bersama pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait terus memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), memberikan edukasi mengenai pengelolaan usaha dan perpajakan, serta melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan daya saingnya. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan produktivitas sektor usaha kecil sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Secara keseluruhan, seluruh rangkaian berita dari tingkat internasional, nasional, hingga Jawa Tengah memperlihatkan bahwa tantangan ekonomi global masih sangat besar, namun berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah di setiap tingkatan diarahkan untuk menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pemerataan pembangunan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi berbagai dinamika global di masa mendatang.

Ringkasan

- Perekonomian global masih menghadapi tekanan yang cukup berat akibat berbagai faktor yang terjadi secara bersamaan, mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar, tingginya ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan internasional, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga kebijakan moneter bank sentral dunia yang masih cenderung ketat. IMF menilai bahwa situasi ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih karena masih dibayangi konflik geopolitik, tingginya beban utang sejumlah negara, inflasi yang belum sepenuhnya terkendali, serta gangguan rantai pasok global. Oleh karena itu, IMF meminta seluruh negara untuk menjaga disiplin fiskal, meningkatkan koordinasi kebijakan ekonomi, memperkuat stabilitas sektor keuangan, serta membangun ketahanan ekonomi agar mampu menghadapi risiko global yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan.
- China sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia menunjukkan perlambatan ekonomi yang cukup signifikan pada kuartal II tahun 2026, di mana pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mencapai 4,3 persen secara tahunan dan menjadi yang terendah dalam lebih dari tiga tahun terakhir. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya permintaan domestik, rendahnya investasi sektor properti dan manufaktur, lemahnya konsumsi rumah tangga, serta meningkatnya ketidakpastian perdagangan internasional. Walaupun sektor ekspor masih mampu bertahan berkat meningkatnya permintaan terhadap produk teknologi tinggi dan infrastruktur AI, kondisi tersebut belum mampu mendorong pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Pemerintah China diperkirakan akan meningkatkan stimulus fiskal, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memberikan berbagai insentif ekonomi untuk menjaga pertumbuhan agar tetap sesuai target pemerintah. Karena China merupakan salah satu pusat perdagangan dunia, perlambatan ekonominya diperkirakan akan memberikan dampak terhadap perdagangan internasional, harga komoditas, dan negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia.
- Di Amerika Serikat, kondisi ekonomi menunjukkan perkembangan yang relatif lebih baik setelah inflasi mengalami penurunan untuk pertama kalinya dalam enam tahun terakhir, terutama dipengaruhi oleh turunnya harga energi dan bahan bakar. Penurunan inflasi tersebut membuat ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve menjadi lebih rendah sehingga memberikan sentimen positif terhadap pasar keuangan global. Namun demikian, Ketua Federal Reserve Kevin Warsh menegaskan bahwa bank sentral belum dapat menyatakan

kemenangan dalam perang melawan inflasi karena masih terdapat berbagai risiko seperti kenaikan harga minyak dunia, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta meningkatnya permintaan akibat perkembangan teknologi AI. Oleh sebab itu, The Fed tetap membuka peluang untuk melakukan penyesuaian kebijakan moneter apabila inflasi kembali meningkat sehingga arah suku bunga global masih menjadi faktor yang terus diperhatikan oleh investor di seluruh dunia.

- Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali menjadi perhatian utama pasar internasional setelah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, yang menyebabkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur distribusi minyak dunia melalui Selat Hormuz. Kondisi tersebut mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia sehingga meningkatkan risiko inflasi di berbagai negara karena biaya energi dan transportasi berpotensi mengalami kenaikan. Akibatnya, pasar keuangan dunia bergerak sangat fluktuatif karena di satu sisi inflasi Amerika Serikat mengalami perlambatan yang memberikan optimisme bagi investor, namun di sisi lain kenaikan harga minyak dapat kembali memicu inflasi global. Situasi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dunia saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh indikator ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik dan keamanan internasional.
- Kondisi ekonomi global tersebut memberikan dampak langsung terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama melalui pergerakan nilai tukar, arus modal asing, perdagangan internasional, dan harga komoditas. Meskipun perlambatan inflasi Amerika Serikat memberikan ruang bagi investor untuk kembali masuk ke pasar negara berkembang, pelemahan ekonomi China tetap menjadi tantangan besar karena China merupakan mitra dagang utama Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu terus menjaga stabilitas ekonomi domestik agar mampu menghadapi perubahan kondisi eksternal yang sewaktu-waktu dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
- Nilai tukar rupiah berhasil menguat dan menjadi salah satu mata uang dengan performa terbaik di kawasan Asia, didukung oleh meredanya ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat, meningkatnya minat investor terhadap pasar obligasi Indonesia, serta kebijakan Bank Indonesia yang terus menjaga stabilitas pasar keuangan. Penguatan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik meskipun tekanan eksternal masih cukup tinggi. Namun demikian, pemerintah dan Bank Indonesia tetap harus mewaspadaai potensi tekanan terhadap rupiah apabila konflik geopolitik meningkat, harga minyak dunia kembali naik, atau kebijakan moneter negara maju berubah secara signifikan.
- Dari sisi pembiayaan pembangunan, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2026 meningkat menjadi sekitar US\$444,4 miliar atau setara Rp8.043,2 triliun, dengan kenaikan terutama berasal dari pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintah masih memanfaatkan pembiayaan luar negeri untuk mendukung kebutuhan APBN dan berbagai program prioritas nasional melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) internasional, sedangkan Bank Indonesia meningkatkan penggunaan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menarik aliran modal asing. Sebaliknya, sektor swasta masih menunjukkan sikap hati-hati dengan mengurangi pembiayaan luar negeri karena tingginya biaya pendanaan dan belum kuatnya prospek permintaan domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah dibandingkan investasi swasta.
- Meskipun jumlah Utang Luar Negeri mengalami peningkatan, struktur utang Indonesia masih dinilai sehat dan relatif aman, karena sekitar 84 persen merupakan utang jangka panjang sehingga risiko pembiayaan ulang lebih rendah. Selain itu, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di kisaran 29,9 persen atau lebih rendah dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Sebagian besar utang pemerintah juga digunakan untuk sektor-sektor produktif seperti kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan, konstruksi,

transportasi, dan kegiatan sosial sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

- Pengelolaan keuangan negara juga menunjukkan capaian yang positif melalui keberhasilan Kementerian Keuangan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima belas tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keuangan negara semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, pemerintah memperkirakan realisasi pendapatan negara tahun 2026 mampu melampaui target APBN terutama karena tingginya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didukung sektor sumber daya alam, migas, serta badan layanan umum. Namun demikian, para ekonom mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap PNBP berbasis komoditas tidak dapat dijadikan strategi jangka panjang sehingga pemerintah tetap harus memperkuat sistem perpajakan dan memperluas basis penerimaan negara agar kondisi fiskal tetap berkelanjutan.
- Berbagai lembaga internasional seperti S&P Global Ratings, IMF, dan Asian Development Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran lima persen dalam beberapa tahun mendatang, namun target pertumbuhan yang lebih tinggi dinilai semakin sulit dicapai apabila tidak diikuti dengan peningkatan investasi, reformasi struktural, percepatan hilirisasi industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta kepastian regulasi yang mampu meningkatkan kepercayaan investor. Dengan demikian, pemerintah perlu memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
- Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, pembangunan daerah terus diarahkan pada pemerataan pembangunan desa melalui Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota. Program ini bertujuan membuka keterisolasian wilayah pedesaan melalui pembangunan jalan, jembatan, talud, irigasi, serta berbagai sarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat sehingga akses distribusi hasil pertanian, perdagangan, dan pelayanan publik menjadi lebih mudah. Selain pembangunan fisik, TMMD juga mengintegrasikan berbagai program sosial seperti pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penurunan angka stunting, pelatihan kewirausahaan, pencegahan pernikahan dini, penyuluhan antinarkoba, hingga penanaman pohon sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan dukungan anggaran yang cukup besar untuk menyelesaikan pelaksanaan TMMD, baik melalui bantuan pembangunan sarana prasarana pedesaan, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, maupun dukungan pembiayaan kegiatan TMMD di berbagai daerah. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat hingga ke daerah-daerah terpencil.
- Selain pembangunan desa, penguatan ekonomi masyarakat Jawa Tengah juga dilakukan melalui pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bank Jateng bersama pemerintah daerah, DPPKUM, KPP Pratama, dan berbagai lembaga terkait terus memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), memberikan edukasi mengenai pengelolaan usaha dan perpajakan, serta melakukan pendampingan berkelanjutan kepada pelaku UMKM agar mampu meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, meningkatkan daya saing produk lokal, dan mendorong UMKM naik kelas. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Implikasi

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi global menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi dunia masih belum berlangsung secara merata, sehingga negara-negara di berbagai kawasan diperkirakan akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan stabilitas sektor keuangan. Kondisi ini akan mendorong pemerintah di berbagai negara untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan fiskal dan moneter karena setiap perubahan kebijakan berpotensi memberikan dampak terhadap perdagangan internasional, arus investasi, serta stabilitas pasar keuangan global.
- Melemahnya pertumbuhan ekonomi China berpotensi menurunkan permintaan terhadap berbagai komoditas dunia, terutama bahan baku industri, energi, dan hasil pertambangan yang selama ini menjadi salah satu penopang perdagangan internasional. Apabila perlambatan tersebut berlangsung lebih lama, maka negara-negara pengekspor komoditas, termasuk Indonesia, dapat mengalami penurunan volume ekspor maupun penerimaan devisa sehingga diperlukan diversifikasi pasar ekspor dan penguatan industri hilir agar ketergantungan terhadap satu pasar dapat dikurangi.
- Penurunan inflasi di Amerika Serikat memberikan peluang bagi stabilitas pasar keuangan global, karena berkurangnya tekanan inflasi dapat mengurangi kebutuhan Federal Reserve untuk kembali menaikkan suku bunga secara agresif. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan arus investasi ke negara-negara berkembang, memperbaiki likuiditas pasar global, serta menurunkan tekanan terhadap nilai tukar berbagai mata uang. Namun demikian, peluang tersebut masih dibatasi oleh ketidakpastian geopolitik dan perkembangan inflasi ke depan sehingga pasar tetap akan bergerak secara fluktuatif.
- Konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan kembali tekanan inflasi global, karena kenaikan biaya energi akan memengaruhi biaya produksi, distribusi, transportasi, hingga harga barang dan jasa di berbagai negara. Apabila kondisi ini terus berlangsung, bank sentral di berbagai negara kemungkinan akan mempertahankan kebijakan moneter yang ketat lebih lama sehingga proses pemulihan ekonomi dunia dapat berlangsung lebih lambat.
- Peringatan IMF mengenai pentingnya menjaga kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter memberikan implikasi bahwa setiap negara harus memperkuat fondasi ekonominya sendiri, termasuk dengan menjaga disiplin anggaran, meningkatkan produktivitas nasional, memperbaiki kualitas investasi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kerja sama internasional agar mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.
- Dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian akan meningkatkan tantangan bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, terutama pada aspek nilai tukar rupiah, inflasi, perdagangan internasional, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, serta berbagai lembaga ekonomi lainnya akan semakin penting agar setiap gejolak global tidak memberikan dampak yang terlalu besar terhadap perekonomian nasional.
- Penguatan rupiah akibat menurunnya ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat memberikan peluang untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia, sehingga arus modal asing berpotensi kembali masuk ke pasar keuangan domestik. Kondisi tersebut dapat memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas pasar obligasi, serta membantu pembiayaan pembangunan nasional. Namun demikian, pemerintah tetap harus mengantisipasi kemungkinan pembalikan arus modal apabila kondisi global kembali memburuk.
- Meningkatnya Utang Luar Negeri pemerintah menunjukkan bahwa sektor publik masih menjadi motor utama pembiayaan pembangunan nasional, sehingga keberhasilan pengelolaan

utang menjadi faktor yang sangat menentukan keberlanjutan pembangunan Indonesia. Apabila pembiayaan tersebut mampu diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, dan pembangunan sumber daya manusia, maka utang dapat menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, apabila tidak dikelola secara efektif, peningkatan utang dapat memperbesar beban fiskal pada masa mendatang.

- Masih terjadinya kontraksi Utang Luar Negeri sektor swasta menunjukkan bahwa dunia usaha masih belum sepenuhnya optimistis terhadap prospek ekonomi, sehingga investasi swasta diperkirakan belum akan tumbuh secara signifikan dalam waktu dekat. Implikasinya, pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penyederhanaan regulasi, pemberian insentif investasi, peningkatan kepastian hukum, serta menjaga stabilitas biaya produksi agar sektor swasta lebih percaya diri melakukan ekspansi usaha.
- Ketergantungan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam memberikan implikasi bahwa penerimaan negara masih cukup sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas dunia, sehingga pemerintah perlu mempercepat reformasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, serta mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru agar struktur penerimaan negara menjadi lebih berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada kondisi pasar komoditas global.
- Keberhasilan Kementerian Keuangan mempertahankan opini WTP selama lima belas tahun berturut-turut akan memperkuat kepercayaan investor dan masyarakat terhadap tata kelola keuangan negara, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah dalam memperoleh pembiayaan pembangunan maupun menarik investasi. Selain itu, capaian tersebut juga menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan APBN pada tahun-tahun berikutnya.
- Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di kisaran lima persen menunjukkan bahwa target pertumbuhan yang lebih tinggi akan semakin menantang, sehingga pemerintah perlu mempercepat transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, peningkatan investasi produktif, penguatan sektor manufaktur, digitalisasi ekonomi, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pengembangan inovasi agar Indonesia mampu keluar dari jebakan pertumbuhan menengah (middle income trap).
- Stabilitas sistem keuangan Indonesia akan semakin bergantung pada kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi, terutama melalui pengelolaan inflasi, penguatan cadangan devisa, pengendalian utang, serta kebijakan moneter yang adaptif terhadap perubahan kondisi global.
- Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) memberikan implikasi yang sangat besar terhadap percepatan pemerataan pembangunan di Jawa Tengah, terutama bagi desa-desa yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, talud, dan sarana pendukung lainnya akan meningkatkan konektivitas antarwilayah sehingga mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, perdagangan, serta akses terhadap pelayanan publik menjadi lebih mudah dan efisien.
- Peningkatan akses infrastruktur di wilayah pedesaan akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, terutama bagi petani, pelaku UMKM, dan sektor perdagangan lokal. Dengan semakin mudahnya distribusi barang dan jasa, biaya logistik dapat ditekan, daya saing produk lokal meningkat, serta aktivitas ekonomi masyarakat desa diperkirakan akan berkembang lebih cepat dibandingkan sebelumnya.
- Integrasi program fisik dan nonfisik dalam TMMD memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap pembangunan desa, karena selain membangun infrastruktur, pemerintah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan kesehatan, pencegahan stunting, penyuluhan ketahanan keluarga, pelatihan kewirausahaan, pelayanan administrasi kependudukan, hingga edukasi mengenai bahaya narkoba dan pernikahan dini. Dengan

demikian, pembangunan tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

- Besarnya dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap TMMD menunjukkan semakin kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum memperoleh akses pembangunan secara optimal.
- Penguatan sektor UMKM melalui perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), edukasi keuangan, dan pendampingan usaha oleh Bank Jateng akan memberikan implikasi terhadap meningkatnya kapasitas usaha masyarakat, karena pelaku UMKM memperoleh kemudahan akses modal sekaligus peningkatan kemampuan dalam mengelola usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas produk. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat struktur ekonomi daerah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi angka kemiskinan, serta memperbesar kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
- Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan pembangunan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan ekonomi, sosial, dan kualitas sumber daya manusia secara bersamaan, sehingga diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berita Kamis, 16 Juli

Kesimpulan

Secara keseluruhan, rangkaian berita menggambarkan bahwa kondisi perekonomian global masih dibayangi oleh ketidakpastian yang berasal dari meningkatnya tensi geopolitik, perubahan arah kebijakan perdagangan internasional, serta dinamika kebijakan moneter di berbagai negara. Ancaman terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah, khususnya akibat konflik yang berdampak pada jalur pelayaran Selat Hormuz, menjadi perhatian utama masyarakat internasional karena jalur tersebut merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Gangguan terhadap distribusi minyak mentah, gas alam, pupuk, dan berbagai komoditas strategis lainnya berpotensi menimbulkan kelangkaan pasokan, meningkatkan biaya logistik, memicu kenaikan harga energi, serta memperbesar tekanan inflasi di berbagai negara. Badan Energi Internasional (IEA) menegaskan bahwa apabila Selat Hormuz tidak kembali dibuka dalam waktu dekat, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan Teluk Persia, tetapi juga akan meluas ke Asia, negara-negara berkembang, hingga perekonomian dunia secara keseluruhan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kestabilan geopolitik masih menjadi faktor yang sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi global, mengingat gangguan pada rantai pasok energi dapat memengaruhi hampir seluruh sektor ekonomi, mulai dari industri, perdagangan, transportasi, hingga aktivitas konsumsi masyarakat di berbagai belahan dunia.

Di tengah ancaman geopolitik tersebut, hubungan perdagangan internasional juga masih menghadapi berbagai tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Amerika Serikat masih terus berupaya memastikan bahwa China mematuhi seluruh komitmen perdagangan yang telah disepakati sebelumnya, sehingga pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping pada September mendatang lebih difokuskan sebagai forum evaluasi dibandingkan penyusunan kesepakatan baru. Pemerintah Amerika Serikat juga terus memperkuat kebijakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok China, terutama pada sektor logam tanah jarang dan bahan baku farmasi yang selama ini menjadi komponen penting bagi industri manufaktur Amerika. Selain itu, Amerika Serikat

meningkatkan tekanan terhadap Vietnam agar memperketat aturan perdagangan, pengawasan terhadap praktik transshipment barang asal China, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta penerapan standar keamanan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persaingan ekonomi antarnegara besar masih menjadi faktor dominan dalam menentukan arah perdagangan global. Akibatnya, banyak negara berkembang harus menyesuaikan kebijakan perdagangan dan investasinya agar tetap mampu menjaga hubungan ekonomi dengan negara-negara mitra utama tanpa mengganggu stabilitas perekonomian domestik.

Dari sisi kebijakan moneter internasional, perkembangan ekonomi menunjukkan bahwa bank-bank sentral di berbagai negara masih menghadapi dilema antara menjaga stabilitas harga dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Di Amerika Serikat, data inflasi produsen yang melandai memberikan sinyal bahwa tekanan inflasi mulai berkurang sehingga ruang bagi Federal Reserve untuk menahan kenaikan suku bunga menjadi semakin terbuka. Namun demikian, meningkatnya kembali konflik di Timur Tengah menyebabkan risiko inflasi akibat kenaikan harga energi masih cukup tinggi sehingga The Fed tetap berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan moneternya. Gubernur The Fed Kevin Warsh juga menegaskan bahwa bank sentral tetap menjalankan tugasnya secara independen dan tidak dipengaruhi tekanan politik meskipun Presiden Donald Trump menginginkan suku bunga yang lebih rendah. Sementara itu, Bank Sentral Korea Selatan memilih menaikkan suku bunga guna menjaga stabilitas nilai tukar won dan mengendalikan inflasi, sedangkan Jepang mulai mempertimbangkan penyesuaian strategi investasi dana pensiun nasional seiring meningkatnya optimisme terhadap prospek pertumbuhan ekonomi domestik. Inggris juga berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi meskipun dalam laju yang lebih lambat dengan sektor jasa sebagai kontributor utama. Seluruh perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa setiap negara sedang berupaya menyesuaikan kebijakan ekonominya masing-masing agar mampu menghadapi tekanan eksternal yang semakin kompleks.

Pergerakan pasar keuangan internasional juga masih dipengaruhi oleh berbagai sentimen tersebut. Mata uang negara-negara Asia bergerak secara bervariasi mengikuti perkembangan inflasi Amerika Serikat, arah kebijakan suku bunga The Fed, serta meningkatnya risiko geopolitik di Timur Tengah. Rupiah sempat tercatat sebagai mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan Asia sepanjang tahun 2026, meskipun pada perdagangan terbaru berhasil menguat selama tiga hari berturut-turut hingga kembali berada di bawah level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penguatan tersebut didukung oleh berbagai sentimen positif dari dalam negeri seperti terjaganya peringkat utang Indonesia pada level investment grade, meningkatnya realisasi investasi, serta komitmen pemerintah menjaga stabilitas harga pangan dan inflasi. Walaupun demikian, para pelaku pasar masih akan terus mencermati perkembangan kebijakan moneter Amerika Serikat, pergerakan imbal hasil obligasi pemerintah AS, dinamika harga komoditas global, serta keputusan Bank Indonesia mengenai suku bunga yang akan menjadi penentu arah pergerakan rupiah pada periode berikutnya.

Di tingkat nasional, Indonesia menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah kondisi global yang masih penuh tantangan. Salah satu indikator yang menunjukkan ketahanan tersebut adalah meningkatnya realisasi investasi pada semester pertama tahun 2026 yang mencapai lebih dari Rp1.010 triliun atau hampir 50 persen dari target investasi tahunan pemerintah. Pertumbuhan investasi tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia masih tetap terjaga meskipun dunia sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi. Pemerintah menilai bahwa stabilitas politik, kondisi sosial yang kondusif, tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, serta berbagai reformasi regulasi terutama dalam penyederhanaan proses perizinan menjadi faktor utama yang mendorong masuknya investasi. Selain itu, tingkat pengembalian investasi yang dinilai kompetitif juga membuat Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik dibandingkan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebut memberikan optimisme bahwa investasi akan tetap menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026.

Kinerja investasi nasional juga menunjukkan perubahan struktur yang cukup menarik. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, Hong Kong berhasil menjadi sumber investasi asing terbesar pada kuartal II tahun 2026, menggeser posisi Singapura yang selama ini mendominasi investasi asing di Indonesia. Pergeseran tersebut terjadi seiring semakin besarnya investasi asal China yang masuk melalui Hong Kong. Selain itu, sektor hilirisasi tetap menjadi penyumbang investasi terbesar dengan kontribusi hampir 30 persen terhadap total investasi nasional. Hilirisasi mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga masih mendominasi, namun pemerintah juga mulai mendorong pengembangan hilirisasi pada sektor perkebunan, kehutanan, minyak dan gas bumi, serta perikanan dan kelautan agar manfaat ekonomi yang dihasilkan semakin luas. Pertumbuhan investasi tersebut juga memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dengan terserapnya lebih dari 1,4 juta tenaga kerja sepanjang semester pertama tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi nasional, tetapi juga mulai memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Meskipun capaian investasi menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, sejumlah ekonom menilai bahwa kualitas pertumbuhan investasi masih perlu ditingkatkan. Pertumbuhan investasi saat ini masih lebih banyak didorong oleh Penanaman Modal Asing (PMA), sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) justru mengalami kontraksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha domestik masih bersikap hati-hati dalam melakukan ekspansi akibat lemahnya permintaan domestik, tingginya biaya pendanaan, serta masih adanya ketidakpastian ekonomi. Selain itu, investasi masih terkonsentrasi pada sektor-sektor padat modal seperti pertambangan dan hilirisasi mineral yang memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan sektor manufaktur padat karya maupun sektor jasa. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi, namun pada saat yang sama juga memperluas investasi ke sektor manufaktur, industri makanan dan minuman, tekstil, elektronik, ekonomi digital, serta sektor-sektor lain yang mampu menciptakan lapangan kerja lebih besar sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Di sisi fiskal, pemerintah masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Defisit APBN tahun 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan target karena penerimaan perpajakan belum mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di sisi lain, meningkatnya rasio utang luar negeri juga menjadi perhatian berbagai kalangan ekonom meskipun secara umum masih berada dalam batas yang aman. Para ekonom mengingatkan bahwa meningkatnya rasio utang terhadap PDB tidak hanya dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah utang, tetapi juga oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan nilai PDB dalam dolar Amerika Serikat menurun. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki kualitas belanja negara, serta memastikan bahwa setiap utang yang diperoleh benar-benar digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas penerimaan negara pada masa mendatang. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap kondisi keuangan negara.

Selain memperkuat kondisi fiskal nasional, pemerintah juga terus berupaya menjaga kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui kebijakan transfer ke daerah yang lebih selektif. Tambahan dana akan diprioritaskan bagi daerah-daerah yang benar-benar mengalami kesulitan fiskal, khususnya dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai, namun tetap dilakukan dengan mempertimbangkan ruang fiskal nasional agar tidak menimbulkan tekanan terhadap APBN. Di sisi lain, kondisi ekonomi daerah menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus berhasil mencatat realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar hampir separuh target tahunan pada semester pertama tahun 2026. Peningkatan penerimaan tersebut terutama berasal dari sektor jasa umum, jasa usaha, serta perizinan tertentu yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi

daerah masih berlangsung cukup baik. Capaian tersebut memberikan optimisme bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, seluruh rangkaian berita dari tingkat internasional, nasional, hingga Jawa Tengah menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara perkembangan ekonomi global dengan kondisi perekonomian Indonesia. Konflik geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan dunia, serta arah kebijakan moneter negara-negara besar masih menjadi faktor eksternal yang memengaruhi stabilitas ekonomi global, arus investasi, perdagangan internasional, pergerakan nilai tukar, serta harga komoditas dunia. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia masih mampu mempertahankan kepercayaan investor, meningkatkan realisasi investasi, memperkuat sektor hilirisasi, menjaga stabilitas nilai tukar, serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi meskipun masih menghadapi tantangan pada sisi fiskal, kualitas investasi, dan daya beli masyarakat. Sementara itu, perkembangan positif di daerah, khususnya Jawa Tengah, menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi nasional mulai tercermin pada peningkatan penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi pada masa mendatang akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mempertahankan iklim investasi yang kondusif, memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas investasi yang lebih inklusif, memperluas penciptaan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, serta terus mengantisipasi berbagai risiko eksternal agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

Ringkasan

- Krisis di Selat Hormuz menjadi perhatian utama dunia setelah meningkatnya eskalasi konflik yang mengganggu jalur pelayaran internasional. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA), Fatih Birol, memperingatkan bahwa apabila jalur strategis tersebut tidak segera dibuka kembali dalam hitungan minggu, perekonomian global berpotensi menghadapi gangguan serius akibat terhambatnya distribusi minyak, gas alam, pupuk, dan berbagai komoditas penting lainnya. Kondisi ini dinilai dapat memicu kenaikan harga energi, memperburuk inflasi global, serta memberikan tekanan yang lebih besar kepada negara-negara berkembang dan negara-negara Asia yang sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk Persia.
- Hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan China masih berada dalam fase yang sensitif menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping pada September 2026. Pemerintah AS menegaskan bahwa agenda utama pertemuan tersebut bukan untuk menciptakan kesepakatan baru, melainkan mengevaluasi sejauh mana China menjalankan komitmen yang telah disepakati sebelumnya, khususnya terkait ekspor logam tanah jarang dan stabilitas hubungan perdagangan. Washington juga masih menyimpan kekhawatiran terhadap ketergantungan industri farmasi Amerika pada bahan baku dari China, sehingga berbagai perusahaan farmasi mulai didorong untuk memindahkan sebagian fasilitas produksinya kembali ke Amerika Serikat.
- Selain China, Vietnam juga menghadapi tekanan dagang dari Amerika Serikat yang meminta negara tersebut memperketat aturan perdagangan, pengawasan terhadap barang-barang asal China yang masuk melalui Vietnam, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta penerapan standar keamanan ekonomi yang lebih tinggi. Negosiasi perdagangan kedua negara masih berlangsung alot karena adanya perbedaan pandangan mengenai aturan asal barang, hambatan non-tarif, dan praktik transshipment yang dituduhkan AS sebagai upaya menghindari tarif terhadap produk China.
- Di sektor moneter global, Federal Reserve (The Fed) masih menjadi sorotan setelah Gubernur Kevin Warsh menegaskan bahwa bank sentral Amerika Serikat tetap independen dan tidak

terpengaruh oleh tekanan politik Presiden Donald Trump yang menginginkan suku bunga lebih rendah. Meskipun inflasi produsen Amerika Serikat pada Juni 2026 tercatat lebih rendah dari perkiraan pasar sehingga memberikan ruang bagi The Fed untuk lebih fleksibel, risiko inflasi akibat konflik Timur Tengah masih menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan suku bunga ke depan.

- Data ekonomi global menunjukkan kondisi yang beragam. Ekonomi Inggris masih mampu tumbuh sebesar 0,1% pada Mei 2026 dengan sektor jasa sebagai motor utama pertumbuhan, meskipun sektor industri dan konstruksi mengalami kontraksi. Sementara itu, Jepang mulai mempertimbangkan penyesuaian strategi investasi dana pensiun negara seiring meningkatnya optimisme terhadap prospek pertumbuhan ekonomi domestik, walaupun pemerintah tetap menegaskan tidak akan mengintervensi keputusan investasi yang dilakukan pengelola dana pensiun nasional.
- Pergerakan mata uang di kawasan Asia masih dipengaruhi oleh perkembangan inflasi Amerika Serikat dan meningkatnya risiko geopolitik. Mayoritas mata uang bergerak terbatas terhadap dolar AS, namun secara kumulatif sepanjang tahun 2026 rupiah tercatat sebagai mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia, sedangkan yuan China justru menjadi mata uang yang mengalami penguatan terbesar terhadap dolar Amerika Serikat.
- Bank Sentral Korea Selatan (Bank of Korea) memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 2,75%. Langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar won yang mengalami tekanan sekaligus mengendalikan ekspektasi inflasi yang masih relatif tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
- Kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah situasi global yang penuh tantangan. Salah satu indikator utamanya terlihat dari realisasi investasi semester I-2026 yang mencapai Rp1.010,6 triliun, atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut telah memenuhi sekitar 49,5% dari target investasi tahunan pemerintah yang sebesar Rp2.041,3 triliun dan berhasil menyerap lebih dari 1,44 juta tenaga kerja.
- Peta investasi asing di Indonesia mengalami perubahan menarik pada kuartal II-2026. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, Hong Kong berhasil menggeser Singapura sebagai investor asing terbesar pada kuartal II, terutama karena meningkatnya investasi China yang masuk melalui Hong Kong. Namun secara kumulatif semester I-2026, Singapura masih menjadi investor terbesar, diikuti Hong Kong, China, Jepang, dan Amerika Serikat.
- Pemerintah menilai tingginya minat investasi asing dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi, politik, dan sosial Indonesia yang relatif lebih baik dibandingkan beberapa negara lain di kawasan. Selain itu, penyederhanaan perizinan dan kepastian regulasi melalui berbagai kebijakan pemerintah juga menjadi faktor penting yang meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal dalam jangka panjang di Indonesia.
- Sektor hilirisasi terus menjadi pilar utama investasi nasional dengan nilai realisasi mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7% dari total investasi semester I-2026. Investasi hilirisasi masih didominasi oleh sektor mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga, namun pemerintah juga mulai mendorong pengembangan hilirisasi di sektor perkebunan, kehutanan, minyak dan gas, serta perikanan dan kelautan guna memperluas manfaat ekonomi yang dihasilkan.
- Dari sisi wilayah, investasi masih tersebar cukup merata antara Pulau Jawa dan luar Jawa. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Banten menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar. Khusus untuk investasi hilirisasi, kontribusi terbesar berasal dari Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara yang menjadi pusat pengembangan industri berbasis sumber daya mineral.
- Di tengah capaian investasi yang positif, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa kualitas investasi masih perlu diperbaiki. Pertumbuhan investasi saat ini lebih banyak didorong oleh Penanaman Modal Asing (PMA), sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) justru

mengalami kontraksi. Selain itu, sebagian besar investasi masih terkonsentrasi pada sektor padat modal yang memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja lebih rendah dibandingkan sektor manufaktur padat karya dan sektor jasa.

- Dari sisi fiskal, pemerintah mengakui bahwa defisit APBN 2025 mencapai 2,81% terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar 2,53%. Kondisi ini disebabkan oleh penerimaan negara yang tidak mencapai target, khususnya dari sektor perpajakan. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga keberlanjutan fiskal melalui pengelolaan pembiayaan yang lebih hati-hati serta peningkatan penerimaan negara pada tahun-tahun berikutnya.
- Sejumlah ekonom juga menyoroti kenaikan utang luar negeri Indonesia yang mencapai US\$444,4 miliar pada Mei 2026. Walaupun secara umum masih berada pada level yang dinilai aman, para ahli mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperkuat basis penerimaan pajak, menjaga disiplin fiskal, mengendalikan biaya utang, serta memastikan bahwa setiap tambahan utang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mampu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan tambahan transfer ke daerah (TKD) secara lebih selektif untuk membantu sejumlah pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal, terutama dalam membayar gaji pegawai. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ruang fiskal nasional agar tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap APBN.
- Di sektor keuangan, rupiah berhasil menguat selama tiga hari berturut-turut hingga kembali berada di bawah Rp18.000 per dolar AS. Penguatan tersebut didorong oleh sentimen positif berupa tetap terjaganya peringkat utang Indonesia pada level investment grade, meningkatnya realisasi investasi, serta keyakinan pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional meskipun ketidakpastian global masih tinggi.
- Meskipun investasi tumbuh cukup baik, sejumlah analis memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 hanya sekitar 4,9%, karena masih adanya perlambatan konsumsi rumah tangga, lemahnya permintaan domestik, serta aktivitas manufaktur yang belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu meningkatkan kualitas investasi agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mendorong daya beli masyarakat secara lebih kuat.
- Dari tingkat daerah, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat perkembangan yang cukup positif dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hingga Juni 2026, realisasi penerimaan retribusi daerah telah mencapai Rp165,72 miliar atau sekitar 47,07% dari target tahunan sebesar Rp352,1 miliar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di daerah masih berjalan dengan baik meskipun kondisi ekonomi nasional dan global menghadapi berbagai tantangan.
- Penerimaan retribusi daerah Kudus terutama berasal dari sektor retribusi jasa umum, yang menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan daerah, disusul oleh retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Kabupaten Kudus optimistis bahwa tren penerimaan yang positif pada semester pertama ini dapat terus berlanjut hingga akhir tahun sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai sesuai rencana.
- Secara umum, perkembangan di Jawa Tengah mencerminkan bahwa stabilitas ekonomi nasional masih mampu memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi daerah. Peningkatan penerimaan daerah menjadi indikator bahwa roda perekonomian lokal tetap bergerak, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih baik untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Implikasi

- Meningkatnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berdampak pada jalur pelayaran Selat Hormuz, berpotensi memperbesar risiko perlambatan ekonomi global karena terganggunya distribusi minyak mentah, gas alam, pupuk, dan berbagai komoditas strategis dunia. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, maka biaya logistik internasional diperkirakan akan meningkat secara signifikan, harga energi global akan terus mengalami kenaikan, inflasi di berbagai negara menjadi lebih sulit dikendalikan, serta aktivitas produksi industri di banyak negara dapat mengalami penurunan akibat tingginya biaya operasional dan terbatasnya pasokan bahan baku.
- Ketidakpastian hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China menunjukkan bahwa stabilitas perdagangan internasional masih akan menghadapi tekanan dalam jangka menengah. Meskipun kedua negara berupaya menjaga komunikasi melalui pertemuan tingkat tinggi, masih adanya perbedaan kepentingan mengenai perdagangan, teknologi, keamanan ekonomi, dan penguasaan rantai pasok global berpotensi menyebabkan arus perdagangan dunia tetap mengalami gangguan. Akibatnya, negara-negara berkembang perlu melakukan diversifikasi pasar ekspor dan memperkuat ketahanan industri domestik agar tidak terlalu bergantung pada dinamika hubungan kedua negara tersebut.
- Tekanan Amerika Serikat terhadap Vietnam untuk memperketat aturan perdagangan dan pengawasan terhadap barang asal China akan mendorong negara-negara Asia melakukan penyesuaian terhadap kebijakan perdagangan internasional mereka. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan perdagangan, memperketat proses ekspor-impor, serta memaksa banyak perusahaan multinasional menata ulang rantai pasok global agar tetap memenuhi ketentuan perdagangan internasional yang semakin ketat.
- Kebijakan bank sentral di berbagai negara yang masih berhati-hati dalam menentukan arah suku bunga menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi global belum sepenuhnya berakhir. Selama inflasi belum benar-benar terkendali dan risiko geopolitik masih tinggi, pasar keuangan dunia diperkirakan akan tetap mengalami volatilitas sehingga arus modal internasional dapat berubah dengan cepat mengikuti perubahan ekspektasi terhadap kebijakan moneter negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat.
- Perbedaan kondisi ekonomi antarnegara, seperti pertumbuhan yang masih positif di Inggris, kenaikan suku bunga di Korea Selatan, dan penyesuaian strategi investasi di Jepang, memperlihatkan bahwa setiap negara harus menerapkan kebijakan ekonomi yang semakin adaptif sesuai karakteristik ekonominya masing-masing. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan ekonomi global menjadi semakin penting untuk meminimalkan dampak perlambatan ekonomi dunia terhadap stabilitas keuangan internasional.
- Meningkatnya realisasi investasi di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional masih cukup kuat meskipun kondisi global penuh ketidakpastian. Apabila tren tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun, maka investasi berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi nasional, memperluas aktivitas industri, memperkuat ekspor, serta membuka lebih banyak lapangan kerja yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Dominasi investasi asing dibandingkan investasi domestik memberikan sinyal bahwa pemerintah perlu memperkuat iklim usaha bagi pelaku usaha nasional agar keseimbangan investasi dapat lebih terjaga. Apabila investasi dalam negeri terus mengalami perlambatan, maka ketergantungan terhadap modal asing akan semakin besar sehingga perekonomian nasional menjadi lebih rentan terhadap perubahan kondisi global maupun perpindahan arus modal internasional.
- Masih terkonsentrasinya investasi pada sektor hilirisasi mineral dan sektor padat modal menunjukkan bahwa manfaat investasi terhadap penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya

optimal. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah mendorong investasi pada sektor manufaktur padat karya, industri pengolahan, ekonomi digital, pertanian modern, serta sektor jasa produktif agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja dan daya beli.

- Keberhasilan pemerintah mempertahankan arus investasi asing di tengah ketidakpastian global berpotensi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi di kawasan Asia Tenggara. Namun keberhasilan tersebut tetap harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyederhanaan regulasi, kepastian hukum, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja agar investor tidak hanya datang untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga membangun industri bernilai tambah tinggi.
- Defisit APBN yang lebih besar dari target serta belum optimalnya penerimaan perpajakan memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu semakin memperkuat reformasi fiskal. Upaya memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki administrasi perpajakan, serta meningkatkan efektivitas belanja negara menjadi sangat penting agar ruang fiskal tetap terjaga tanpa harus meningkatkan ketergantungan terhadap pembiayaan utang.
- Meningkatnya utang luar negeri Indonesia meskipun masih berada pada batas yang aman memberikan peringatan bahwa keberlanjutan fiskal harus menjadi prioritas utama pemerintah. Pengelolaan utang yang lebih selektif, penggunaan utang untuk proyek-proyek produktif, pengendalian beban bunga, serta diversifikasi sumber pembiayaan menjadi langkah penting agar kemampuan pemerintah dalam membayar kewajiban tetap terjaga tanpa mengurangi ruang pembangunan pada masa mendatang.
- Rencana pemerintah menambah transfer ke daerah secara selektif menunjukkan bahwa kemampuan fiskal antar daerah masih belum merata. Kebijakan tersebut berimplikasi pada perlunya evaluasi terhadap struktur belanja daerah, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menggali pendapatan asli daerah, serta penyusunan kebijakan fiskal daerah yang lebih efisien agar ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dapat berkurang secara bertahap.
- Penguatan nilai tukar rupiah selama beberapa hari terakhir memberikan dampak positif terhadap persepsi investor dan stabilitas pasar keuangan domestik. Namun demikian, keberlanjutan penguatan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, kebijakan suku bunga Federal Reserve, harga komoditas internasional, serta kebijakan Bank Indonesia sehingga stabilitas makroekonomi tetap harus dijaga melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten.
- Perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya berada di kisaran 4,9 persen menunjukkan bahwa investasi yang meningkat belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu memperkuat konsumsi rumah tangga, meningkatkan produktivitas sektor manufaktur, mempercepat transformasi industri, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi dan berkualitas.
- Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui investasi memberikan dampak positif terhadap pasar kerja nasional, namun pemerintah tetap perlu memastikan bahwa lapangan kerja yang tercipta memiliki kualitas yang baik, produktivitas tinggi, serta mampu memberikan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat investasi tidak hanya tercermin pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara langsung.
- Peningkatan realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih tumbuh dengan cukup baik meskipun kondisi ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sehingga pembangunan infrastruktur, peningkatan

kualitas pelayanan publik, serta penyediaan berbagai fasilitas masyarakat dapat terus berjalan sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

- Tingginya kontribusi retribusi jasa umum terhadap pendapatan daerah mengindikasikan bahwa pelayanan publik masih menjadi sumber utama penerimaan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi pengelolaan retribusi, serta transparansi administrasi agar penerimaan daerah dapat terus meningkat tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
- Apabila target penerimaan retribusi daerah berhasil tercapai hingga akhir tahun, maka pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program pembangunan, memperkuat pelayanan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
- Masih adanya rencana pemerintah pusat untuk menambah transfer ke daerah menunjukkan bahwa sebagian pemerintah daerah, termasuk di berbagai wilayah Indonesia, masih menghadapi keterbatasan fiskal dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai maupun pelayanan publik. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah perlu terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki tata kelola keuangan, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal agar ketahanan fiskalnya semakin kuat.